

ISSN: 2355 – 6323

# **EKONOMI & PEMBANGUNAN**

*Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*

Volume XII No. 3, Desember 2025

**Elok Dining Lestari  
Elsyan R. Marlissa**

**ANALISIS KETIMPANGAN ANTAR DAERAH DALAM  
MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI PAPUA  
PEGUNUNGAN**

**Semuel Pongmakamba' La'lang  
Hasan Basri Umar**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENDAPATAN USAHA TANI PERKEBUNAN KOPI ARABIKA DI  
DISTRIK WELESI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**Yopi Suabey  
Halomoan Hutajulu**

**ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN  
MANOKWARI**

**Ema Dame Lasria Hutasoit  
Agustina Ester Antoh**

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN  
KESEMPATAN KERJA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI  
KOTA JAYAPURA**

**Irwan Dwi Saputra  
Agustina Sanggrangbano**

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP  
KEMISKINAN MELALUI KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KABUPATEN NABIRE**



**Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Cenderawasih**

## **EKONOMI & PEMBANGUNAN**

*Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*

**Volume XII No. 3, Desember 2025**

Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan terbit tiga kali setahun memuat berbagai artikel hasil pemikiran filosofis, konseptual, teoritis, telaah kritis (*critical review*), dan berbagai hasil penelitian di bidang ekonomi pembangunan (*development economics*) dan pembangunan ekonomi (*economics development*).

### **Ketua Penyunting**

Dr. Yundy Hafizrianda, SE, M.Si.

### **Wakil Ketua Penyunting**

Charley M. Bisai, SE, MSE.

### **Penyunting Pelaksana**

Marsi Adi Purwadi, SE, M.Si.

Olinda Putri Papuana, SE.

Hijrah Irwan, SE.

### **Penyunting Ahli**

**Prof. Dr. Arung Lamba, SE, M.Si.**  
Universitas Cenderawasih

**Prof. Dr. H. Hasan Basri Umar, MS**  
Universitas Cenderawasih

**Dr. Hans Z. Kaiwai, SE, M.Sc., Agr.**  
Universitas Cenderawasih

**Prof. Dr. Mesak Iek, SE, M.Si.**  
Universitas Cenderawasih

**Dr. Ida Ayu Purba Riani, SE, M.Si.**  
Universitas Cenderawasih

**Prof. Dr. Elsyhan R. Marlissa, SE., M.Si.**  
Universitas Cenderawasih

### **Alamat Redaksi :**

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Cenderawasih

Gedung D FEB UNCEN Kampus Waena

Telp./Fax. : (0967) 571988

Email : [journal@ieuncen.ac.id](mailto:journal@ieuncen.ac.id); [jurnal\\_ilmuekonomi@yahoo.co.id](mailto:jurnal_ilmuekonomi@yahoo.co.id)

---

Penyunting menerima berbagai tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik dengan format seperti tercantum pada halaman kulit dalam-belakang (Persyaratan Naskah). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

---

**EKONOMI & PEMBANGUNAN**

*Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*

**Volume XII No. 3, Desember 2025**

**DAFTAR ISI**

ANALISIS KETIMPANGAN ANTAR DAERAH DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN <i>Elok Dining Lestari &amp; Elsyah R. Marlissa</i>	1-11
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHA TANI PERKEBUNAN KOPI ARABIKA DI DISTRIK WELESI KABUPATEN JAYAWIJAYA <i>Semuel Pongmakamba' La'lang &amp; Hasan Basri Umar</i>	12-21
ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN MANOKWARI <i>Yopi Suabey &amp; Halomoan Hutajulu</i>	22-31
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA JAYAPURA <i>Ema Dame Lasria Hutasoit &amp; Agustina Ester Antoh</i>	32-40
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN MELALUI KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KABUPATEN NABIRE <i>Irwan Dwi Saputra &amp; Agustina Sanggrangbano</i>	41-54

## PENGANTAR REDAKSI

*J*urnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan (JKESP) Volume XII No. 3, Desember 2025, berisikan lima tulisan, seluruh tulisan merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Tulisan pada edisi kali ini termasuk dalam lingkup kajian atau bidang Ekonomi Regional, Ekonomi Pertanian, dan Kewirausahaan. Dalam bidang ekonomi regional dilakukan oleh Elok Dining Lestari & Elsyah R. Marlissa dengan judul penelitian *Analisis Ketimpangan Antar Daerah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Papua Pegunungan*. Kemudian Ema Dame Lasria Hutasoit & Agustina Ester Antoh dengan judul *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Jayapura*, dan Irwan Dwi Saputra & Agustina Sanggrangbano dengan judul *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Melalui Kualitas Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Nabire*. Selanjutnya di bidang Ekonomi Pertanian adalah Samuel Pongmakamba' La'lang & Hasan Basri Umar dengan judul penelitian *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Tani Perkebunan Kopi Arabika Di Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya*. Sementara untuk bidang Kewirausahaan dilakukan oleh Yopi Suabey & Halomoan Hutajulu dengan judul *Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Manokwari*.

Keterbatasan dan kekurangan dalam pelaksanaan penelitian, analisis data dan proses editing yang dilakukan oleh tim redaksi mungkin dijumpai dalam tulisan-tulisan ini. Oleh sebab itu saran dan kritik sangat diharapkan dari semua pihak. Semoga Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca.

Jayapura, Desember 2025

Tim Redaksi

## ANALISIS KETIMPANGAN ANTAR DAERAH DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

**Elok Dining Lestari**<sup>1</sup>  
*elokdininglestari1979@gmail.com*

**Elsyan R. Marlissa**<sup>2</sup>  
*elsyan\_marlissa@yahoo.com*

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the level of interregional inequality and the influence of population and per capita income on economic development inequality in Papua Mountains Province during the 2018-2022 period. The research method used is associative research with quantitative secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics of Yahukimo Regency. Data analysis was conducted using three descriptive tools, namely the Williamson Index to measure the level of inequality, Klassen Typology to classify regions based on economic growth and per capita income, and Location Quotient to identify basic and non-basic sectors. Furthermore, to test the influence of independent variables on inequality, this study applied panel data regression with the help of Eviews 9 software, through a series of model specification tests, classical assumption tests, as well as partial and simultaneous hypothesis tests. The results show that interregional inequality in Papua Mountains Province is classified as high and continues to increase significantly from year to year, with all Williamson Index values falling into the high category. Based on the Klassen Typology, no regency falls into the fast-growing and advanced region category, while Yahukimo and Tolikara Regencies fall into the lagging region category. The Location Quotient analysis results indicate that the agriculture, construction, and various public service sectors are basic or leading sectors. The hypothesis test results prove that population and per capita income, both partially and simultaneously, have a positive and significant effect on economic development inequality. Thus, inequality in Papua Mountains Province is a serious problem triggered by the high population and unequal per capita income, which requires comprehensive and targeted policy interventions.*

*Keywords: Regional Inequality, Economic Development, Population, Per Capita Income*

### PENDAHULUAN

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan impian setiap daerah, yang salah satu caranya adalah melalui pembangunan ekonomi yang baik. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang memerlukan perubahan besar pada berbagai aspek, seperti sosial, sikap mental, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan penurunan angka kemiskinan. Keberhasilan pembangunan ini sering diukur melalui pertumbuhan ekonomi, yang menjadi indikator utama keberhasilan suatu wilayah.

Secara teoretis, pembahasan tentang ketimpangan antar daerah tidak terlepas dari Hipotesis Williamson atau yang sering disebut sebagai kurva U-terbalik (*inverted-U hypothesis*). Hipotesis ini pertama kali diperkenalkan oleh Williamson (1965, dalam Nagao, 1993) dalam studinya tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional dengan ketimpangan antar wilayah. Williamson menyatakan bahwa pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat secara terus menerus hingga mencapai titik puncaknya, dan baru akan menurun jika proses pembangunan terus berlanjut. Dengan kata lain, kurva ketimpangan berbentuk U terbalik, di mana negara berkembang cenderung memiliki ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan negara maju. Hipotesis ini kemudian diuji oleh Williamson menggunakan data time series dan cross-section dari 24 negara, dan terbukti secara empiris. Sementara itu, pemikiran North (1991) lebih berfokus pada peran institusi dan hak milik (*property rights*) dalam mendorong

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>2</sup> Staf Dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yang merupakan ranah kajian yang berbeda namun saling melengkapi dengan studi tentang ketimpangan regional. Selain itu, konsep konvergensi atau hubungan unggul juga menjadi perhatian, karena mengacu pada proses di mana wilayah dengan pendapatan rendah cenderung tumbuh lebih cepat daripada wilayah maju jika didukung oleh akses terhadap teknologi, pengetahuan, investasi pendidikan, serta kebijakan perdagangan dan investasi yang mendukung.

Beranjak dari kerangka teoretis tersebut, berbagai studi empiris telah dilakukan untuk menguji bagaimana ketimpangan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Nilawati (2019) dalam studinya menemukan bahwa kota-kota besar di Indonesia, terutama di bagian timur, memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur fisik yang lebih baik dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Namun demikian, keunggulan infrastruktur ini ternyata tidak serta merta menghilangkan ketimpangan. Sebaliknya, di Indonesia bagian timur, tingkat ketimpangan justru sebanding dengan banyak negara di Afrika akibat distribusi infrastruktur yang tidak merata, yang selanjutnya menimbulkan kesenjangan signifikan dalam PDRB per kapita dan pembangunan yang tidak merata di seluruh wilayah. Dalam konteks yang lebih spesifik di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, Kurniawati dan Cahyono (2022) menemukan bahwa sektor pertambangan dan penggalian serta jasa kesehatan menjadi sektor prioritas untuk mengoptimalkan PDRB Provinsi Papua, sementara De Fretes (2017) mengidentifikasi sektor-sektor unggulan Papua meliputi pertambangan, konstruksi, dan administrasi pemerintahan.

Dari sisi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan, Muharam (2022) di Yogyakarta menemukan bahwa pendidikan dan kemiskinan berdampak substansial terhadap ketimpangan pendapatan, sementara jumlah penduduk justru berkorelasi negatif meskipun tidak signifikan. Sejalan dengan itu, Hartini (2017) dan Sholihah (2013) membuktikan bahwa PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang sesuai dengan Teori Kuznet bahwa dalam jangka pendek terdapat korelasi positif antara pendapatan per kapita dengan ketimpangan. Selain pendekatan kuantitatif, Perkasa (2023) memberikan perspektif kualitatif yang penting dengan memvalidasi bahwa ketimpangan yang dialami Orang Asli Papua (OAP) menjadi salah satu pemicu konflik, di mana intervensi bantuan tunai justru dikhawatirkan merusak mentalitas kerja OAP dan semakin memperparah ketimpangan.

Secara keseluruhan, beragam studi empiris di atas menunjukkan bahwa ketimpangan antar daerah merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk jumlah penduduk, pendapatan per kapita, pendidikan, infrastruktur, kebijakan pemerintah, bahkan faktor budaya dan politik. Memahami kompleksitas tersebut, permasalahan utama yang dihadapi Provinsi Papua Pegunungan adalah ketidaksetaraan ekonomi yang mencolok antara daerah maju dan daerah terpinggirkan, di mana banyak wilayah mengalami pertumbuhan lambat dan akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kondisi geografis pegunungan yang sulit diakses menjadikan provinsi ini sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak memiliki garis pantai (terkurung daratan), sehingga menghambat konektivitas ekonomi dan distribusi sumber daya. Faktor-faktor lain seperti perbedaan sumber daya alam, alokasi dana pembangunan yang tidak merata, serta kapasitas pemerintah daerah yang terbatas turut memperburuk ketimpangan. Bahkan, pandemi COVID-19 sempat menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang drastis, seperti yang dialami Kabupaten Jayawijaya yang turun hingga -4,08% pada tahun 2020, meskipun setelah pandemi berakhir pertumbuhan ekonomi kembali meningkat.

Berdasarkan seluruh uraian teoretis dan empiris tersebut, penelitian tentang ketimpangan di Provinsi Papua Pegunungan menjadi sangat menarik dan penting untuk dilakukan karena dua alasan utama. Pertama, provinsi ini merupakan provinsi baru hasil pemekaran yang memiliki karakteristik unik sebagai satu-satunya provinsi terkurung daratan di Indonesia, sehingga kajian tentang ketimpangan ekonominya masih sangat terbatas, padahal berdasarkan indeks Williamson ketimpangan di provinsi ini terus meningkat secara signifikan dalam kategori tinggi pada periode 2018-2022. Kedua, terdapat hubungan erat antara ketimpangan ekonomi dan konflik sosial, di mana ketimpangan yang dialami Orang Asli Papua (OAP) menjadi pemicu konflik yang menghambat pembangunan, sementara kebijakan bantuan tunai justru dikhawatirkan merusak mentalitas kerja OAP sehingga semakin memperparah ketimpangan dalam jangka panjang. Dengan mempertimbangkan latar belakang teoretis yang kuat, beragam temuan empiris yang telah dikaji, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *Analisis Ketimpangan Antar Daerah dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan*. Penelitian ini diharapkan tidak hanya melengkapi literatur yang masih

terbatas, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan data sekunder kuantitatif yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan periode 2018-2022, meliputi data jumlah penduduk dan PDRB per kapita. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga alat deskriptif: Indeks Williamson untuk mengukur tingkat ketimpangan (rendah, sedang, tinggi), Tipologi Klassen untuk mengklasifikasikan daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, serta Location Quotient (LQ) untuk mengidentifikasi sektor basis dan non basis. Selanjutnya, untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap ketimpangan, peneliti menerapkan regresi data panel dengan bantuan software Eviews 9, melalui serangkaian uji spesifikasi model (Uji Chow dan Uji Hausman) yang menghasilkan Fixed Effect Model (FEM) sebagai model terbaik, kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis parsial (uji t), uji simultan (uji F), uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas (Jarque-Bera), uji heteroskedastisitas (Glejser), dan uji autokorelasi.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1. Analisis Ketimpangan Wilayah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan antar daerah di Provinsi Papua Pegunungan dari tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan. Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson, nilai ketimpangan selama periode 2013 hingga 2022 seluruhnya berada di atas 0,5, yang berarti ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi ini termasuk dalam kategori tinggi. Peningkatan yang paling konsisten terjadi pada periode 2018 hingga 2022.

**Tabel 1. Indeks Williamson Provinsi Papua Pegunungan**

Tahun	Indeks Williamson	Kategori
2013	0,61	Tinggi
2014	0,68	Tinggi
2015	0,73	Tinggi
2016	0,78	Tinggi
2017	0,82	Tinggi
2018	0,87	Tinggi
2019	0,93	Tinggi
2020	0,91	Tinggi
2021	0,91	Tinggi
2022	0,95	Tinggi

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat seluruh nilai Indeks Williamson dari tahun 2013 hingga 2022 berada di atas 0,5, yang berarti bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan selama periode tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Pada tahun 2022, indeks mencapai nilai tertinggi sebesar 0,95, yang mengindikasikan bahwa kesenjangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan sangat tinggi dan cenderung memburuk dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di provinsi ini belum berhasil dinikmati secara merata oleh seluruh kabupaten.

Selanjutnya, berdasarkan analisis Tipologi Klassen untuk periode 2018-2022, diketahui bahwa tidak ada satupun kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang termasuk dalam kategori daerah maju dan tumbuh cepat. Klasifikasi lengkap keempat kategori wilayah disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Tipologi Klassen Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2018-2022**

	$y > \bar{y}$	$y < \bar{y}$
$r > \bar{r}$	<b>Kuadran I</b> (Daerah maju dan tumbuh cepat): <i>Tidak ada</i>	<b>Kuadran III</b> (Daerah berkembang cepat): Yalimo, Nduga, Lanny Jaya
$r < \bar{r}$	<b>Kuadran II</b> (Daerah maju tapi tertekan): Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah	<b>Kuadran IV</b> (Daerah tertinggal): Yahukimo, Tolikara

*Keterangan:*

$r$  = pertumbuhan ekonomi kabupaten

$\bar{r}$  = pertumbuhan ekonomi provinsi

$y$  = PDRB per kapita kabupaten

$\bar{y}$  = PDRB per kapita provinsi

Kuadran I (Daerah maju dan tumbuh cepat) merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang keduanya di atas rata-rata provinsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada satupun kabupaten yang termasuk dalam kuadran ini. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada daerah yang berhasil mencapai keunggulan ganda, baik dalam hal pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pendapatan per kapita yang tinggi secara simultan. Kuadran II (Daerah maju tapi tertekan) ditempati oleh daerah dengan pendapatan per kapita di atas rata-rata provinsi ( $y > \bar{y}$ ) tetapi pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata provinsi ( $r < \bar{r}$ ). Tiga kabupaten yang termasuk dalam kuadran ini adalah Jayawijaya, Pegunungan Bintang, dan Mamberamo Tengah. Artinya, kabupaten-kabupaten ini memiliki tingkat pendapatan per kapita yang relatif tinggi, namun pertumbuhan ekonominya lambat atau mengalami perlambatan, sehingga berpotensi tertinggal jika tidak segera didorong pertumbuhannya. Kuadran III (Daerah berkembang cepat) ditempati oleh daerah dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi ( $r > \bar{r}$ ) tetapi pendapatan per kapitanya masih di bawah rata-rata provinsi ( $y < \bar{y}$ ). Tiga kabupaten yang termasuk dalam kuadran ini adalah Yalimo, Nduga, dan Lanny Jaya. Kabupaten-kabupaten ini menunjukkan kinerja pertumbuhan yang baik, namun tingkat kesejahteraan penduduknya (yang tercermin dari pendapatan per kapita) masih rendah. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang tinggi dapat diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Kuadran IV (Daerah tertinggal) ditempati oleh daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang keduanya berada di bawah rata-rata provinsi ( $r < \bar{r}$  dan  $y < \bar{y}$ ). Dua kabupaten yang termasuk dalam kuadran ini adalah Yahukimo dan Tolikara. Kabupaten-kabupaten ini merupakan daerah yang paling memprihatinkan karena mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat sekaligus tingkat pendapatan per kapita yang rendah, sehingga memerlukan intervensi kebijakan prioritas dari pemerintah daerah dan pusat.

Selanjutnya secara sektoral, berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) untuk periode 2018-2022, ditemukan bahwa hanya ada enam sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori basis atau sektor unggulan di Provinsi Papua Pegunungan, sedangkan sebelas sektor lainnya termasuk dalam kategori non basis, lihat Tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Analisis Location Quotient (LQ) Provinsi Papua Pegunungan**

No	Lapangan Usaha	LQ Rata <sup>2</sup>	Kriteria
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,16	Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	0,87	Non Basis
3	Industri Pengolahan	0,42	Non Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,38	Non Basis
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,31	Non Basis
6	Konstruksi	1,17	Basis

No	Lapangan Usaha	LQ Rata <sup>2</sup>	Kriteria
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,79	Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0,59	Non Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,59	Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	0,39	Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,51	Non Basis
12	Real Estate	0,68	Non Basis
13	Jasa Perusahaan	0,42	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	1,22	Basis
15	Jasa Pendidikan	1,23	Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,17	Basis
17	Jasa Lainnya	1,14	Basis

Sumber : BPS Provinsi Papua, data diolah (2024)

## 2. Analisis Regresi Data Panel

Tabel 4 berikut ini merangkum hasil uji statistik yang digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling tepat, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk memilih antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Hipotesis nol ( $H_0$ ) dalam uji ini menyatakan bahwa model yang tepat adalah CEM, sedangkan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) menyatakan bahwa model yang tepat adalah FEM. Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000. Karena nilai ini lebih kecil dari ambang batas signifikansi 0,05 ( $0,0000 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, Fixed Effect Model (FEM) lebih baik daripada Common Effect Model (CEM)

**Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Penentuan Model Panel**

Jenis Uji	Hipotesis	Nilai	Prob.	Ambang Batas	Kesimpulan
Uji Chow	$H_0$ : CEM $H_1$ : FEM	11,68284	0,0000	< 0,05	Tolak $H_0 \rightarrow$ Model FEM
Uji Hausman	$H_0$ : REM $H_1$ : FEM	81,77988	0,0000	< 0,05	Tolak $H_0 \rightarrow$ Model FEM

Sumber: data diolah (2024)

Selanjutnya, Uji Hausman digunakan untuk memilih antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Hipotesis nol ( $H_0$ ) menyatakan bahwa model yang tepat adalah REM, sedangkan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) menyatakan bahwa model yang tepat adalah FEM. Hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05 ( $0,0000 < 0,05$ ), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya, Fixed Effect Model (FEM) juga lebih baik daripada Random Effect Model (REM). Berdasarkan kedua uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model regresi data panel yang paling tepat dan terbaik untuk penelitian ini. Pemilihan FEM mengindikasikan bahwa terdapat karakteristik unik atau efek spesifik dari masing-masing kabupaten (cross-section) yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi, dan efek tersebut bersifat tetap atau konstan sepanjang periode waktu penelitian. Dengan kata lain, perbedaan antar kabupaten seperti kondisi geografis, kebijakan lokal, atau infrastruktur yang berbeda-beda memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan dan perlu diperhitungkan dalam model.

Setelah ditemukan model data panel yang tepat, yaitu model FEM, tahap selanjutnya adalah melakan uji asumsi klasik, dengan maksud untuk menetapkan apakah model regresi yang digunakan menghasilkan estimasi yang sah (valid) dan tidak bias. Terdapat tiga uji asumsi klasik yang dilakukan, yakni uji normalitas, heteroskedastis, dan autokorelasi.

**Tabel 5. Hasil Uji Asumsi Klasik**

No	Jenis Uji	Statistik Uji	Nilai	Prob.	Ambang Batas	Kesimpulan
1	Normalitas (Jarque-Bera)	Jarque-Bera	2,2912	0,3180	> 0,05	Residual berdistribusi normal
2	Heteroskedastisitas (Glejser)	Obs*R-squared	25,9291	0,8654	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
3	Autokorelasi	Prob (F-statistic)	1,8120	0,1368	> 0,05	Tidak terjadi autokorelasi

Pertama, uji normalitas dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah residual (error) dari model regresi berdistribusi normal. Hasil uji menunjukkan nilai Jarque-Bera sebesar 2,291242 dengan nilai probabilitas sebesar 0,318026. Karena nilai probabilitas ini lebih besar dari 0,05 ( $0,318026 > 0,05$ ), maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa residual berdistribusi normal tidak dapat ditolak. Kesimpulannya, residual model berdistribusi normal, sehingga model layak digunakan untuk inferensi statistik. Kedua, uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Glejser. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual antar pengamatan. Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas Obs\*R-squared sebesar 0,8654 yang lebih besar dari 0,05 ( $0,8654 > 0,05$ ), sehingga hipotesis nol yang menyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas diterima. Kesimpulannya, model tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, yang berarti varians residual bersifat konstan (homoskedastisitas). Ketiga, uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada periode waktu yang berbeda (dalam data panel). Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,136809 yang lebih besar dari 0,05 ( $0,136809 > 0,05$ ), sehingga hipotesis nol yang menyatakan tidak terjadi autokorelasi diterima. Kesimpulannya, model tidak mengalami masalah autokorelasi. Dengan terpenuhinya seluruh asumsi klasik (normalitas, homoskedastisitas, dan bebas autokorelasi), maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), sehingga hasil uji hipotesis dan kesimpulan yang diambil dapat diandalkan secara statistik.

Setelah model dinyatakan memenuhi asumsi klasik, dilakukan uji hipotesis parsial (uji t) untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap ketimpangan. Hasil uji t disajikan pada Tabel 6 di bawah ini.

**Tabel 6. Hasil Uji t (Parsial)**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C (Konstanta)	0,506880	0,036744	13,79497	0,0000
X <sub>1</sub> (Jumlah Penduduk)	0,670807	2,75E-07	2,423587	0,0180
X <sub>2</sub> (Pendapatan Per Kapita)	0,759807	1,49E-08	7,060680	0,0000
a. Dependent : Ketimpangan				

Sumber : data diolah (2024)

Keterangan : model regresi dibangun berdasarkan model data panel FEM

Hasil uji hipotesis parsial (uji t) menunjukkan variabel Jumlah Penduduk (X<sub>1</sub>) memiliki nilai koefisien sebesar 0,670807 dengan probabilitas sebesar 0,0180. Karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ( $0,0180 < 0,05$ ), maka hipotesis nol (H<sub>0</sub>) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap ketimpangan ditolak, dan hipotesis alternatif (H<sub>1</sub>) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan diterima. Nilai koefisien yang positif (0,670807) mengindikasikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Artinya, semakin tinggi jumlah penduduk di suatu kabupaten, semakin tinggi pula tingkat ketimpangan ekonomi di kabupaten tersebut. Hal ini dapat dijelaskan bahwa daerah dengan jumlah penduduk besar cenderung menghadapi tekanan yang lebih

tinggi terhadap lapangan kerja, layanan publik, dan sumber daya, yang jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang merata akan memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Untuk variabel Pendapatan Per Kapita ( $X_2$ ), hasil uji menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,759807 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Karena nilai probabilitas ini jauh lebih kecil dari 0,05 ( $0,0000 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Nilai koefisien yang positif (0,759807) mengindikasikan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Temuan ini sesuai dengan Teori Kuznet yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek, peningkatan pendapatan per kapita justru akan meningkatkan ketimpangan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya menurun setelah mencapai titik tertentu. Nilai koefisien pendapatan per kapita (0,759) lebih besar dibandingkan koefisien jumlah penduduk (0,670), yang berarti bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap ketimpangan dibandingkan jumlah penduduk di Provinsi Papua Pegunungan.

Guna melengkapi hasil uji parsial ini, maka dilakukan uji hipotesis simultan (uji F) untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama. Hasil uji F disajikan pada Tabel 7 berikut ini.

**Tabel 7. Hasil Uji F (Simultan)**

Statistik	Nilai
R-squared	0,572848
Adjusted R-squared	0,517929
F-statistic	10,43068
Prob(F-statistic)	0,000000

Sumber : data diolah (2024)

Hasil uji F menunjukkan nilai F-statistic sebesar 10,43068 dengan nilai probabilitas (Prob. F-statistic) sebesar 0,000000. Karena nilai probabilitas ini jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ( $0,000000 < 0,05$ ), maka hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa secara simultan tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ditolak, dan hipotesis alternatif ( $H_3$ ) yang menyatakan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan diterima. Dengan demikian, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan periode 2018-2022.

Selanjutnya, nilai R-squared (koefisien determinasi) sebesar 0,572848 atau 57,28 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 57,28 persen variasi atau perubahan pada ketimpangan pembangunan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk dan pendapatan per kapita secara bersama-sama, sedangkan sisanya sebesar 42,72 persen ( $100\% - 57,28\%$ ) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti tingkat pendidikan, investasi, infrastruktur, kemiskinan, kebijakan pemerintah, dan faktor geografis. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,517929 (51,79%) merupakan nilai R-squared yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel, yang juga mengindikasikan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan ketimpangan cukup baik.

### 3. Pembahasan

Temuan pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan tergolong tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson, nilai ketimpangan pada periode 2018 hingga 2022 berada pada kisaran 0,87 hingga 0,95, jauh di atas ambang batas 0,5 yang menandakan kategori tinggi. Kondisi ini mencerminkan bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah di provinsi baru hasil pemekaran tersebut sangat memprihatinkan. Beberapa faktor penyebab utama ketimpangan yang diidentifikasi meliputi perbedaan kondisi demografi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, serta kurangnya lapangan kerja. Selain itu, ketimpangan juga dipicu oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan alokasi dana pembangunan antar wilayah yang tidak merata (Sjafrizal, 2008). Yang lebih menarik, observasi Perkasa (2023) memvalidasi bahwa ketimpangan yang dialami Orang Asli Papua (OAP) menjadi salah satu pemicu konflik sosial, yang pada gilirannya menghambat pembangunan itu sendiri. Ironisnya, kebijakan bantuan tunai langsung dan dana desa yang seharusnya mengurangi ketimpangan justru dikhawatirkan merusak mentalitas kerja OAP, menjadikan mereka bergantung pada bantuan dan semakin

memperparah ketimpangan. Dengan demikian, meningkatnya indeks Williamson dari 0,61 pada tahun 2013 menjadi 0,95 pada tahun 2022 tidak hanya menunjukkan masalah ekonomi, tetapi juga mengindikasikan adanya akar masalah sosial dan budaya yang lebih dalam.

Ketimpangan yang tinggi tersebut juga tercermin dari pola pertumbuhan ekonomi antar kabupaten yang sangat beragam. Hasil analisis Tipologi Klassen mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang termasuk dalam kategori daerah maju dan tumbuh cepat (Kuadran I). Hal ini berarti tidak ada wilayah yang berhasil mencapai keunggulan ganda, baik dalam hal pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pendapatan per kapita yang tinggi secara simultan. Tiga kabupaten, yaitu Jayawijaya, Pegunungan Bintang, dan Mamberamo Tengah, tergolong sebagai daerah maju tapi tertekan (Kuadran II), karena meskipun pendapatan per kapitanya di atas rata-rata provinsi, pertumbuhan ekonominya justru melambat. Tiga kabupaten lainnya, yaitu Yalimo, Nduga, dan Lanny Jaya, termasuk daerah berkembang cepat (Kuadran III), dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun pendapatan per kapitanya masih rendah. Dua kabupaten yang paling memprihatinkan adalah Yahukimo dan Tolikara, yang masuk dalam kategori daerah tertinggal (Kuadran IV) karena pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya sama-sama di bawah rata-rata provinsi. Keragaman pola ini menegaskan bahwa setiap kabupaten memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, sehingga strategi pembangunan yang seragam tidak akan efektif.

Selain ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan, struktur ekonomi Provinsi Papua Pegunungan juga menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sektor-sektor tertentu. Hasil analisis Location Quotient (LQ) mengidentifikasi enam sektor basis (unggulan) di provinsi ini, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (LQ 1,16); Konstruksi (LQ 1,17); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (LQ 1,22); Jasa Pendidikan (LQ 1,23); Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (LQ 1,17); serta Jasa Lainnya (LQ 1,14). Dominasi sektor pertanian dan kehutanan sangat wajar mengingat kondisi geografis pegunungan yang subur, sementara dominasi sektor jasa publik mencerminkan besarnya peran pemerintah di provinsi baru hasil pemekaran. Menarik untuk dicermati, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Kurniawati dan Cahyono (2022) serta De Fretes (2017) di Provinsi Papua yang justru menempatkan sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor unggulan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Provinsi Papua Pegunungan memiliki karakteristik ekonomi yang unik, berbeda dengan provinsi tetangganya. Sebelas sektor lainnya, termasuk industri pengolahan (LQ 0,42) dan perdagangan (LQ 0,79), termasuk kategori non basis. Lemahnya sektor industri pengolahan dan perdagangan mengindikasikan bahwa perekonomian provinsi ini masih sangat bergantung pada sektor primer dan jasa publik, sehingga rentan terhadap guncangan ekonomi.

Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan regresi data panel. Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pemilihan model terbaik melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000 ( $< 0,05$ ), sehingga Fixed Effect Model (FEM) dipilih daripada Common Effect Model (CEM). Hasil Uji Hausman juga menunjukkan nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0,0000 ( $< 0,05$ ), yang kembali mengonfirmasi bahwa FEM lebih tepat daripada Random Effect Model (REM). Dengan terpilihnya FEM, hal ini mengindikasikan bahwa setiap kabupaten memiliki karakteristik unik yang bersifat tetap dan mempengaruhi ketimpangan, seperti kondisi geografis, kebijakan lokal, atau kualitas infrastruktur yang berbeda-beda.

Setelah model terpilih, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan valid. Uji normalitas dengan Jarque-Bera menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,318026 ( $> 0,05$ ), yang berarti residual model berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan nilai probabilitas Obs\*R-squared sebesar 0,8654 ( $> 0,05$ ), sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji autokorelasi menghasilkan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,136809 ( $> 0,05$ ), yang berarti tidak terjadi autokorelasi. Dengan terpenuhinya seluruh asumsi klasik, model regresi yang digunakan telah memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), sehingga hasil uji hipotesis dapat diandalkan secara statistik.

Hasil uji hipotesis parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki nilai koefisien sebesar 0,670 dengan probabilitas 0,0180 ( $< 0,05$ ). Temuan ini membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Semakin tinggi jumlah penduduk di suatu kabupaten, semakin tinggi pula tingkat ketimpangan di kabupaten tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Lincoln (dalam Arsyad, 2010) bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan berbagai masalah karena pesatnya penambahan tenaga kerja tidak

diimbangi dengan kemampuan daerah menciptakan lapangan kerja baru. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Muharam (2022) di Yogyakarta yang menemukan korelasi negatif antara populasi dan ketimpangan, yang menunjukkan bahwa pengaruh jumlah penduduk sangat kontekstual tergantung pada karakteristik wilayah.

Variabel pendapatan per kapita juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan, dengan nilai koefisien sebesar 0,759 dan probabilitas 0,0000 ( $< 0,05$ ). Nilai koefisien yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk mengindikasikan bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap ketimpangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hartini (2017) di Yogyakarta, dan sesuai dengan Teori Kuznet yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek, peningkatan pendapatan per kapita justru akan meningkatkan ketimpangan terlebih dahulu sebelum akhirnya menurun setelah mencapai titik tertentu. Penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa nilai PDRB per kapita yang tinggi mungkin disebabkan oleh adanya segelintir kelompok masyarakat yang berpenghasilan sangat tinggi, sehingga angka rata-rata menjadi bias dan tidak mencerminkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Hasil uji hipotesis simultan (uji F) memperkuat temuan-temuan sebelumnya, dengan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,0000 ( $< 0,05$ ). Hal ini membuktikan bahwa jumlah penduduk dan pendapatan per kapita secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Nilai R-squared sebesar 0,572848 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan sekitar 57,28 persen variasi ketimpangan, sementara sisanya sebesar 42,72 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model, seperti tingkat pendidikan, investasi, infrastruktur, kemiskinan, dan kebijakan pemerintah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Azizah dkk (2018) di Provinsi Jawa Timur, yang membuktikan bahwa jumlah penduduk dan pendapatan per kapita secara simultan mempengaruhi ketimpangan atau kemiskinan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami akar penyebab ketimpangan di Provinsi Papua Pegunungan. Ketimpangan yang tinggi dan terus meningkat tidak hanya disebabkan oleh faktor demografi dan ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sulit, dominasi sektor pertanian dan jasa publik, lemahnya sektor industri dan perdagangan, serta faktor sosial budaya seperti perubahan mentalitas akibat kebijakan bantuan tunai. Karenanya, upaya mengatasi ketimpangan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan tunggal, melainkan memerlukan strategi yang komprehensif dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten. Daerah tertinggal seperti Yahukimo dan Tolikara memerlukan intervensi prioritas, sementara daerah berkembang cepat seperti Yalimo, Nduga, dan Lanny Jaya perlu dipastikan bahwa pertumbuhan ekonominya dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara merata. Yang tidak kalah penting, kebijakan bantuan sosial perlu dirancang ulang agar tidak menciptakan ketergantungan, tetapi justru memberdayakan masyarakat OAP sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja keras yang telah melekat secara naluriah.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama, yaitu :

- a. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan tergolong tinggi dan terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Seluruh nilai Indeks Williamson selama periode penelitian berada dalam kategori tinggi, dengan kecenderungan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan belum mampu dinikmati secara merata oleh seluruh wilayah di provinsi tersebut. Dimana berdasarkan analisis Tipologi Klassen, diketahui bahwa tidak ada satupun kabupaten yang termasuk dalam kategori daerah maju dan tumbuh cepat. Beberapa kabupaten seperti Jayawijaya, Pegunungan Bintang, dan Mamberamo Tengah masuk dalam kategori daerah maju tapi tertekan, artinya memiliki pendapatan per kapita yang relatif tinggi namun pertumbuhan ekonominya melambat. Kabupaten Yalimo, Nduga, dan Lanny Jaya termasuk dalam kategori daerah berkembang cepat, artinya memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun pendapatan per kapitanya masih rendah. Sementara itu, Kabupaten Yahukimo dan Tolikara termasuk dalam

- kategori daerah tertinggal, artinya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya sama-sama berada di bawah rata-rata provinsi.
- b. Berdasarkan hasil analisis model regresi data panel dalam bentuk FEM diperoleh bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan. Artinya, semakin tinggi jumlah penduduk di suatu kabupaten, maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan ekonomi di kabupaten tersebut. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik akan memperbesar tekanan terhadap sumber daya yang ada, sehingga kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar. Sementara itu untuk variabel pendapatan per kapita, juga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan. Bahkan, pengaruh pendapatan per kapita terbukti lebih dominan dibandingkan pengaruh jumlah penduduk. Temuan ini sesuai dengan Teori Kuznet yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek, peningkatan pendapatan per kapita justru akan meningkatkan ketimpangan terlebih dahulu sebelum akhirnya menurun setelah mencapai titik tertentu.
  - c. Secara simultan terbukti bahwa jumlah penduduk dan pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan. Kedua variabel tersebut mampu menjelaskan sebagian besar variasi ketimpangan yang terjadi, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model seperti tingkat pendidikan, investasi, infrastruktur, kemiskinan, dan kebijakan pemerintah. Temuan ini mengonfirmasi bahwa permasalahan ketimpangan di provinsi ini tidak dapat diabaikan dan memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran.

## 2. Saran-Saran

Secara teoritis, penelitian ini mengonfirmasi Teori Kuznet bahwa peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka pendek justru memperlebar ketimpangan, namun karena masih terdapat sekitar empat puluh tiga persen variasi ketimpangan yang dijelaskan oleh variabel lain di luar model, maka peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel seperti tingkat pendidikan, investasi, infrastruktur, dan indeks pembangunan manusia. Selain itu, mengingat Provinsi Papua Pegunungan memiliki karakteristik unik sebagai satu-satunya provinsi terkurung daratan di Indonesia, diperlukan pengembangan model teoritis yang lebih kontekstual untuk wilayah pegunungan dan wilayah tanpa garis pantai. Temuan tentang dampak negatif bantuan tunai terhadap mentalitas kerja masyarakat adat juga membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kualitatif untuk menggali aspek sosial budaya dan ekonomi politik yang mempengaruhi ketimpangan.

Adapun secara praktis, pemerintah daerah diharapkan menggerakkan enam sektor unggulan yang telah teridentifikasi yaitu pertanian, konstruksi, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya melalui peningkatan produktivitas, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik. Pemerintah juga perlu meningkatkan pembangunan manusia melalui pelatihan keterampilan dan kursus vokasi yang relevan agar masyarakat, terutama penduduk asli Papua, mampu bersaing di pasar kerja dan membuka lapangan kerja sendiri. Kebijakan pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada pemerataan lapangan kerja melalui proyek padat karya, perluasan akses terhadap sarana publik seperti jalan dan listrik, serta pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yang menggantikan skema bantuan tunai agar tidak menciptakan ketergantungan. Terakhir, pemerintah perlu memberikan intervensi prioritas bagi daerah tertinggal seperti Yahukimo dan Tolikara, mendorong kembali pertumbuhan di daerah maju tapi tertekan, serta memastikan pertumbuhan di daerah berkembang cepat dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara merata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariansyah, T. S. (2017). Analisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB per kapita, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang tahun 2001-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).

- Arif, M., dan Wicaksana, R. A. (2017). Ketimpangan pendapatan propinsi Jawa Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *URECOL*, 323-328.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Azizah, E. W., Sudarti, S., dan Kusuma, H. (2018). Pengaruh pendidikan, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 167-180.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Pedoman perhitungan proyeksi penduduk dan angkatan kerja*. Badan Pusat Statistik.
- De Fretes, P. N. (2017). Analisis sektor unggulan (LQ), struktur ekonomi (shift share), dan proyeksi produk domestik regional bruto Provinsi Papua 2018. *Develop*, 1(2).
- Firman, F., Parinusa, S., dan Maspaitella, M. R. (2023). Analisis peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Provinsi Papua Barat pendekatan input-output. *Lensa Ekonomi*, 17(1), 17-37.
- Hartini, N. T. (2017). Pengaruh PDRB per kapita, investasi dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi DIY tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 6(6), 530-539.
- Kurniawati, A. D., & Cahyono, H. (2022). Optimalisasi pertumbuhan ekonomi daerah dengan analisis sektor unggulan di Papua. *Independent: Journal of Economics*, 2(3), 49-63.
- Maspaitella, M., Parinussa, S. M., & Tewernusa, K. I. (2021). Applying location quotient and shift-share analysis in determining leading sectors in Teluk Bintuni Regency. *Journal of Developing Economies*, 6(1), 55-65.
- Muharam, K. I. (2022). Analisis ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2020 (Studi kasus di 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi DIY). *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(2), 284-294.
- Nagao, K. (1993). Changing Regional Income Disparities in Canada, 1951-1989. *Journal Free Access*, 45(6), 559-580.
- North, D. C. (1991). Institutions. *The Journal of Economic Perspectives*, 5(1). 97-112.
- Perkasa, V. D. (2023). Papua dan Ekonomi Politik yang Destruktif. [<https://www.kompas.id/artikel/papua-dan-ekonomi-politik-yang-destruktif>]
- Sama, A. A. F. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Sulawesi (Tahun 2011-2015). *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Baduose Media.
- Suyatno. (2000). *Pembangunan daerah di Indonesia*. (Tidak dipublikasikan – disebut dalam artikel sebagai sumber rujukan).
- Williamson, J. G. (1965). Regional inequality and the process of national development: A description of patterns. *Economic Development and Cultural Change*, 13(4), 3-45.
- Nilawati, E. (2019). Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 9(1), 41-60.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN  
USAHA TANI PERKEBUNAN KOPI ARABIKA DI DISTRIK WELESI  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**Semuel Pongmakamba' La'lang<sup>1</sup>**

**Hasan Basri Umar<sup>2</sup>**  
*umarhasan56@yahoo.co.id*

**ABSTRACT**

*This study aims to examine and analyze the influence of price, total production, coffee processing technology, labor, capital, and land area on the income of Arabica coffee farmers in Welesi District, Jayawijaya Regency. This research employed a quantitative method with a survey approach. The population of this study was all coffee farmers in Welesi District totaling 100 people, and the sample was selected using probability sampling technique. Data were collected through questionnaires measured using a Likert scale and direct interviews. The data analysis methods used were classical assumption tests (normality, multicollinearity, and heteroscedasticity), multiple linear regression analysis, partial t-test, simultaneous F-test, and coefficient of determination R<sup>2</sup> test. The results showed that partially, price and total production variables had a positive and significant effect on coffee farmers' income at the 95 percent confidence level, while coffee processing technology, labor, and capital variables were only significant at the 90 percent confidence level. The land area variable had no significant effect on coffee farmers' income at both confidence levels. However, simultaneously, all six independent variables had a very significant effect on coffee farmers' income with a coefficient of determination value of 87.9 percent, while the remaining was influenced by other variables outside the research model.*

*Keywords: Price, production, technology, labor, capital, land area, coffee farmers' income*

**PENDAHULUAN**

Secara teoretis, produksi didefinisikan sebagai kegiatan mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen untuk meningkatkan manfaat barang atau jasa (Soeharno, 2009). Dalam sistem produksi, input diproses menjadi output melalui transformasi nilai tambah, dengan pengendalian kualitas sebagai umpan balik. Skala ekonomi atau economies of scale merupakan fenomena turunnya biaya produksi per unit seiring peningkatan jumlah produksi, yang meliputi volume economies of scale dari peningkatan kapasitas dan learning economies of scale dari akumulasi pengalaman (Pearson & Wisner, 1993). Apabila skala operasi ditingkatkan tanpa pengelolaan yang efisien, perusahaan dapat mengalami diseconomies of scale (Carpenter & Sanders, 2007). Efisiensi mengacu pada penurunan biaya produksi, sementara efektivitas mengacu pada peningkatan nilai tambah melalui kualitas produk (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2005). Indikator efisiensi usaha meliputi pencapaian tujuan, penghematan sumber daya, dan maksimalisasi pemanfaatan sumber daya (Syam, 2020). Faktor-faktor produksi yang mempengaruhi pendapatan petani antara lain luas lahan, pupuk, tenaga kerja, harga, produksi, modal, dan teknologi pengolahan. Lahan merupakan pabrik hasil pertanian yang menentukan besar kecilnya produksi (Mubyarto, 1989), sementara pupuk organik berperan menyangga sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas lahan (Supartha, 2012), dan tenaga kerja adalah faktor produksi asli yang mengandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan (Rosyidi, 2004).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji isu serupa dan hasilnya saling melengkapi serta memperkuat studi tentang usaha tani kopi. Adriyansyah & Marheni (2017) dalam penelitiannya tentang usaha perkebunan kopi Arabika di Kintamani, Bangli, menemukan bahwa luas lahan, pemupukan, dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh terhadap produksi kopi. Temuan ini sejalan dengan penelitian

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>2</sup> Staf Dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

Pradnyani (2014) pada perkebunan kakao di Abiansemal, Bandung, yang secara spesifik menyoroti bahwa luas lahan merupakan faktor dominan yang berpengaruh terhadap produksi. Sementara itu, Diarawati (2011) dalam penelitiannya pada usahatani cabai rawit di Sukawati, Gianyar, memfokuskan pada faktor pemupukan dan membuktikan bahwa pemupukan yang tepat dan efisien memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi. Hasil ini memperkuat temuan Adriyansyah dan Marheni (2017) yang juga mengakui pentingnya pemupukan. Di sisi lain, Sari (2011) dalam penelitiannya pada usahatani jagung manis di Denpasar Timur justru menekankan peran tenaga kerja sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap produksi. Dengan demikian, keempat penelitian tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa tidak ada satu faktor pun yang berdiri sendiri dalam mempengaruhi produksi dan pendapatan petani; luas lahan, pemupukan, dan tenaga kerja saling terkait dan berkontribusi secara berbeda tergantung pada jenis komoditas dan karakteristik lokasi penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks perkebunan kopi Arabika di Welesi, keenam faktor yang diteliti (harga, produksi, teknologi, tenaga kerja, modal, dan luas lahan) perlu dikaji secara simultan karena kemungkinan besar saling berinteraksi dan mempengaruhi pendapatan petani secara bersama-sama.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa meskipun luas lahan kopi di Distrik Welesi mencapai 366,93 hektar dengan produksi 32,6 ton per tahun (BPS, 2022), peningkatan luas lahan tidak diikuti oleh peningkatan produksi yang proporsional. Berdasarkan data penelitian (2024), Kampung Yagara dengan luas 38 hektar menghasilkan 20 ton, sementara Kampung Asolijelipele dengan luas 20 hektar menghasilkan 15 ton, yang berarti produktivitas per hektar masih rendah dan bervariasi. Petani menghadapi keterbatasan pengetahuan manajemen perkebunan, kurangnya modal, rendahnya keahlian, serta belum optimalnya penerapan teknologi pengolahan kopi, sehingga mereka belum mampu menghitung skala ekonomi dan efisiensi faktor produksi (Daniel, 2001; Sriyoto dkk, 2007). Padahal pemahaman tentang biaya tetap produksi (Munandar, 2001) sangat penting untuk memperoleh laba yang tinggi. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena kopi Welesi sebenarnya memiliki keunggulan komparatif sebagai kopi organik, namun petani belum mampu memanfaatkan potensi tersebut secara efisien karena keterbatasan modal dan teknologi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi teoretis yang dijelaskan dalam kajian teori dan realitas empiris di lapangan, sekaligus mengonfirmasi relevansi temuan-temuan penelitian terdahulu bahwa faktor-faktor produksi seperti modal, teknologi, dan tenaga kerja memang memiliki peran penting namun belum dioptimalkan oleh petani Welesi.

Berdasarkan latar belakang teoretis, tematan penelitian terdahulu yang saling terkait, serta fenomena kesenjangan di lapangan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah harga kopi, produksi kopi, teknologi pengolahan kopi, tenaga kerja, modal, dan luas lahan berpengaruh terhadap pendapatan petani kopi di Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena tiga alasan utama. Pertama, masih sangat jarang penelitian tentang skala ekonomi dan efisiensi usaha perkebunan kopi yang dilakukan di wilayah pegunungan tengah Papua, sehingga penelitian ini akan mengisi celah akademis yang belum banyak tersentuh. Kedua, terdapat kesenjangan empiris yang unik di mana peningkatan luas lahan tidak diikuti oleh peningkatan produksi secara proporsional, yang mengindikasikan adanya inefisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi; temuan ini sekaligus memperkuat dan memperkaya hasil penelitian terdahulu yang umumnya dilakukan di luar Papua. Ketiga, kopi Arabika Welesi merupakan kopi organik unggulan yang telah dikenal hingga mancanegara, namun potensi ekonominya belum tergarap optimal karena lemahnya pemahaman petani tentang skala ekonomi dan efisiensi; oleh karena itu, hasil penelitian ini sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam merumuskan program penyuluhan dan pendampingan yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan petani kopi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara langsung serta data sekunder dari literatur dan pemerintah setempat. Populasi penelitian adalah seluruh petani kopi di distrik tersebut, dan sampel diambil sebanyak 100 orang petani menggunakan teknik probability sampling. Metode analisis data

meliputi deskriptif kuantitatif, regresi linier berganda, uji parsial t, uji simultan F, serta uji koefisien determinasi R<sup>2</sup>. Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh harga, jumlah produksi, teknologi pengolahan, tenaga kerja, modal, dan luas lahan terhadap pendapatan petani kopi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Karakteristik Responden

Tabel 1 berikut ini menyajikan gambaran karakteristik responden petani kopi di Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya berdasarkan tiga aspek, yaitu jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan, dengan total responden sebanyak 96 orang.

**Tabel 1. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Tingkat Pendidikan**

Karakteristik	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	71	73,96
	Perempuan	25	26,04
	Jumlah	96	100
Usia	20-30 tahun	36	37,50
	31-40 tahun	42	43,75
	41-50 tahun	18	18,75
	>50 tahun	0	0,00
	Jumlah	96	100
Tingkat Pendidikan	SD	15	15,63
	SMP	36	37,50
	SMA	38	39,58
	D3	7	7,29
	Jumlah	96	100

Sumber : data diolah (2024)

Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 71 orang atau 73,96 persen, sementara responden perempuan sebanyak 25 orang atau 26,04 persen. Dominasi tenaga kerja laki-laki ini menunjukkan bahwa kegiatan perkebunan kopi di Distrik Welesi, mulai dari membersihkan lahan, menanam, memelihara, hingga memanen, secara tradisional lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, meskipun perempuan juga turut berperan terutama dalam kegiatan pascapanen seperti sortasi biji kopi.

Jika dilihat dari aspek usia yang dikelompokkan menjadi empat kelas, mayoritas responden justru berada pada rentang usia 31 hingga 40 tahun sebanyak 42 orang atau 43,75 persen, diikuti oleh kelompok usia 20 hingga 30 tahun sebanyak 36 orang atau 37,50 persen, dan kelompok usia 41 hingga 50 tahun sebanyak 18 orang atau 18,75 persen, sementara tidak terdapat responden yang berusia di atas 50 tahun. Dengan demikian, secara keseluruhan petani kopi di Distrik Welesi didominasi oleh usia produktif antara 20 hingga 40 tahun yang mencapai 78 responden atau 81,25 persen. Hal ini berarti bahwa mayoritas petani masih berada pada fase usia yang energik dan memiliki stamina fisik yang cukup untuk mengelola perkebunan kopi secara optimal, sehingga secara teoritis mereka memiliki potensi besar untuk menerapkan praktik-praktik pertanian yang lebih intensif dan efisien.

Selain usia, tingkat pendidikan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi dan manajemen usaha tani. Berdasarkan data dalam tabel yang sama, responden yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan kelompok terbanyak yaitu 38 orang atau 39,58 persen, diikuti oleh responden berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 36 orang atau 37,50 persen, kemudian responden berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 15 orang atau 15,63 persen, dan yang berpendidikan Diploma (D3) sebanyak 7 orang atau 7,29 persen. Dengan kata lain, sebagian besar petani kopi (77,08 persen) telah menamatkan pendidikan

menengah (SMP dan SMA), yang secara teoritis seharusnya memberikan kemampuan dasar dalam memahami informasi teknis budidaya kopi, menghitung skala ekonomi dan efisiensi, serta mengelola usaha tani secara lebih profesional. Namun demikian, masih terdapat 15 orang petani dengan pendidikan SD yang mungkin memerlukan pendekatan penyuluhan yang lebih sederhana, praktis, dan berbasis demonstrasi langsung di lapangan.

Secara keseluruhan, karakteristik responden yang didominasi oleh laki-laki usia produktif dengan pendidikan menengah merupakan modal sosial yang cukup baik untuk pengembangan usaha perkebunan kopi yang lebih efisien dan berkelanjutan di Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya, karena faktor-faktor seperti usia muda dan tingkat pendidikan yang memadai secara teori berkorelasi positif dengan kemampuan petani dalam mengadopsi inovasi, menghitung efisiensi usaha, serta mengoptimalkan skala ekonomi dalam usahatani.

**2. Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, serta untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen apabila variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya (Sugiyono, 2005). Dalam konteks penelitian ini, analisis regresi berganda bertujuan untuk menguji pengaruh enam variabel independen, yaitu harga (X1), jumlah produksi (X2), teknologi pengolahan kopi (X3), tenaga kerja (X4), modal (X5), dan luas lahan (X6), terhadap variabel dependen yaitu pendapatan petani kopi (Y) di Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk mengetahui variabel mana yang dominan memberi sumbangan terhadap pendapatan petani, serta untuk melihat apakah pengaruh tersebut bersifat positif atau negatif.

Namun perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa seluruh variabel yang diamati dalam penelitian ini diukur menggunakan skala ordinal, bukan skala rasio. Pengukuran masing-masing variabel dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden petani kopi di Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya, di mana responden diminta memberikan jawaban berdasarkan skala Likert 1 hingga 5. Variabel harga diukur melalui 6 butir pernyataan, variabel jumlah produksi diukur melalui 5 butir pernyataan, variabel teknologi pengolahan kopi diukur melalui 6 butir pernyataan, variabel tenaga kerja diukur melalui 6 butir pernyataan, variabel modal diukur melalui 5 butir pernyataan, variabel luas lahan diukur melalui 6 butir pernyataan, dan variabel pendapatan petani kopi diukur melalui 6 butir pernyataan. Dengan demikian, nilai-nilai yang dianalisis dalam regresi berganda ini merupakan skor total dari jawaban responden terhadap butir-butir pernyataan tersebut, bukan nilai riil dalam satuan ukur tertentu seperti rupiah atau hektar.

**Tabel 2. Hasil Uji Regresi Berganda**

Variabel	Coefficients	t-stat	Sig.	Keterangan
Constant	3,745			
Harga	0,233	3,878	0,000**	Sangat Signifikan
Jumlah Produksi	0,191	2,610	0,011**	Signifikan
Teknologi Pengolahan Kopi	0,130	1,825	0,071*	Signifikan
Tenaga Kerja	0,160	1,814	0,073*	Signifikan
Modal	0,141	1,861	0,066*	Signifikan
Luas Lahan	0,103	1,128	0,262	Tidak Signifikan
Adjusted R Square	0,879			
F-stat	115,927			
Sig.	0,000			

Sumber : data diolah (2024)

Keterangan : \*\* Signifikan pada  $\alpha = 0,05$  ; \* Signifikan pada  $\alpha = 0,10$

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik, sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2 di atas, persamaan regresi linier berganda yang terbentuk adalah :

$$Y = 3,745 + 0,233 X_1 + 0,191 X_2 + 0,130 X_3 + 0,160 X_4 + 0,141 X_5 + 0,103 X_6 + \varepsilon$$

di mana Y adalah pendapatan petani kopi, X1 adalah harga, X2 adalah jumlah produksi, X3 adalah teknologi pengolahan kopi, X4 adalah tenaga kerja, X5 adalah modal, dan X6 adalah luas lahan. Nilai konstanta sebesar 3,745 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen bernilai nol atau tidak mengalami perubahan, maka pendapatan petani kopi di Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya akan tetap berada pada angka 3,745 satuan. Seluruh koefisien regresi bertanda positif, yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pada masing-masing variabel independen akan diikuti oleh peningkatan pendapatan petani kopi. Dalam menganalisis signifikansi pengaruh masing-masing variabel, penelitian ini menggunakan dua tingkat signifikansi, yaitu  $\alpha = 0,05$  (tingkat kepercayaan 95%) dan  $\alpha = 0,10$  (tingkat kepercayaan 90%), untuk melihat seberapa besar pengaruh setiap variabel terhadap pendapatan petani.

Variabel harga memiliki koefisien regresi sebesar 0,233 dengan nilai t-stat sebesar 3,878 dan signifikansi sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  maupun  $\alpha = 0,10$ , nilai signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 dan 0,10, sehingga harga dinyatakan berpengaruh sangat signifikan terhadap pendapatan petani kopi. Dengan demikian, setiap kenaikan harga kopi sebesar satu satuan akan meningkatkan pendapatan petani sebesar 0,233 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Temuan ini sesuai dengan teori ekonomi bahwa harga merupakan sinyal pasar yang secara langsung mempengaruhi penerimaan petani. Variabel jumlah produksi memiliki koefisien regresi sebesar 0,191 dengan nilai t-stat sebesar 2,610 dan signifikansi sebesar 0,011. Pada  $\alpha = 0,05$ , nilai 0,011 lebih kecil dari 0,05, sehingga jumlah produksi berpengaruh signifikan. Demikian pula pada  $\alpha = 0,10$ , nilai 0,011 juga lebih kecil dari 0,10. Oleh karena itu, jumlah produksi dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani kopi. Kedua variabel ini, yaitu harga dan jumlah produksi, merupakan variabel yang paling kuat pengaruhnya karena nilai signifikansinya berada di bawah ambang batas 0,05.

Selanjutnya, variabel teknologi pengolahan kopi memiliki koefisien regresi sebesar 0,130 dengan nilai t-stat sebesar 1,825 dan signifikansi sebesar 0,071. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ , nilai 0,071 lebih besar dari 0,05, sehingga teknologi pengolahan kopi dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani. Namun, pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,10$ , nilai 0,071 lebih kecil dari 0,10, sehingga teknologi pengolahan kopi dinyatakan berpengaruh signifikan. Dengan kata lain, teknologi pengolahan kopi berpengaruh signifikan pada tingkat kepercayaan 90% tetapi tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Pola yang sama juga terjadi pada variabel tenaga kerja. Variabel tenaga kerja memiliki koefisien regresi sebesar 0,160 dengan nilai t-stat sebesar 1,814 dan signifikansi sebesar 0,073. Pada  $\alpha = 0,05$ , nilai 0,073 > 0,05 berarti tidak signifikan, sementara pada  $\alpha = 0,10$ , nilai 0,073 < 0,10 berarti signifikan. Demikian pula variabel modal memiliki koefisien regresi sebesar 0,141 dengan nilai t-stat sebesar 1,861 dan signifikansi sebesar 0,066, di mana pada  $\alpha = 0,05$  dinyatakan tidak signifikan (0,066 > 0,05) tetapi pada  $\alpha = 0,10$  dinyatakan signifikan (0,066 < 0,10). Ketiga variabel ini (teknologi pengolahan kopi, tenaga kerja, dan modal) menunjukkan pola yang sama, yaitu signifikan pada tingkat kepercayaan 90% namun tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 95%.

Berbeda dengan kelima variabel sebelumnya, variabel luas lahan menunjukkan hasil yang berbeda. Variabel luas lahan memiliki koefisien regresi sebesar 0,103 dengan nilai t-stat sebesar 1,128 dan signifikansi sebesar 0,262. Pada kedua tingkat signifikansi, yaitu  $\alpha = 0,05$  maupun  $\alpha = 0,10$ , nilai 0,262 jauh lebih besar dari 0,05 dan 0,10, sehingga luas lahan dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani kopi. Temuan ini sangat menarik karena bertentangan dengan teori Mubyarto (1989) yang menyatakan bahwa luas lahan merupakan pabrik hasil pertanian yang menentukan besar kecilnya produksi. Tidak signifikannya pengaruh luas lahan di Distrik Welesi mengindikasikan bahwa petani belum mampu mengoptimalkan lahan yang mereka miliki, kemungkinan karena rendahnya penerapan teknologi, keterbatasan modal, atau kurangnya tenaga kerja terampil.

Apabila diringkas berdasarkan tingkat signifikansi yang digunakan, pada  $\alpha = 0,05$  (tingkat kepercayaan 95%), hanya dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani kopi, yaitu harga dan jumlah produksi, sementara teknologi pengolahan kopi, tenaga kerja, modal, dan luas lahan tidak berpengaruh signifikan. Namun, pada  $\alpha = 0,10$  (tingkat kepercayaan 90%), terdapat lima variabel yang berpengaruh signifikan, yaitu harga, jumlah produksi, teknologi pengolahan kopi, tenaga kerja, dan modal, dengan hanya luas lahan yang tetap tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil antara kedua tingkat signifikansi ini menunjukkan bahwa teknologi, tenaga kerja, dan modal sebenarnya

memiliki pengaruh terhadap pendapatan, hanya saja pengaruhnya tidak cukup kuat untuk dinyatakan signifikan pada taraf kepercayaan yang lebih tinggi (95%). Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya akses petani terhadap teknologi pengolahan kopi modern, rendahnya kualitas tenaga kerja meskipun jumlahnya mungkin cukup, serta keterbatasan sumber permodalan yang mudah diakses oleh petani kopi di Distrik Welesi.

Selanjutnya, hasil uji simultan atau uji F menunjukkan nilai F-stat sebesar 115,927 dengan signifikansi 0,000. Pada kedua tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$  maupun  $\alpha = 0,10$ ), nilai 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 dan 0,10, sehingga secara bersama-sama keenam variabel independen (harga, jumlah produksi, teknologi pengolahan kopi, tenaga kerja, modal, dan luas lahan) berpengaruh sangat signifikan terhadap pendapatan petani kopi di Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,879 berarti bahwa 87,9 persen variasi pendapatan petani kopi dapat dijelaskan oleh keenam variabel tersebut secara bersama-sama, sementara sisanya sebesar 12,1 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini (Ghozali, 2018). Nilai yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik.

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan analisis dengan dua tingkat signifikansi ini adalah bahwa pendapatan petani kopi di Distrik Welesi paling dipengaruhi secara kuat oleh harga dan jumlah produksi pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara itu, teknologi pengolahan kopi, tenaga kerja, dan modal memiliki pengaruh yang lebih lemah, yaitu hanya signifikan pada tingkat kepercayaan 90%. Adapun luas lahan sama sekali tidak berpengaruh signifikan pada kedua tingkat kepercayaan. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa untuk meningkatkan pendapatan petani kopi secara signifikan, prioritas utama harus diberikan pada stabilisasi dan peningkatan harga kopi serta peningkatan jumlah produksi. Namun demikian, pengaruh teknologi, tenaga kerja, dan modal yang signifikan pada tingkat kepercayaan 90% tidak boleh diabaikan, karena ketiga faktor tersebut merupakan variabel pendukung yang saling terkait dan berperan penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, kebijakan yang bersifat holistik dan terintegrasi tetap diperlukan, yang mencakup perbaikan akses terhadap teknologi pengolahan kopi modern, penyediaan sumber permodalan yang mudah dan murah, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan penyuluhan berkelanjutan, sehingga seluruh faktor produksi dapat dioptimalkan secara efisien dan pendapatan petani kopi di Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya dapat meningkat secara berkelanjutan.

### 3. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap pendapatan petani kopi di Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya, baik pada tingkat kepercayaan 95 persen ( $\alpha = 0,05$ ) maupun 90 persen ( $\alpha = 0,05$ ). Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi dasar yang menyatakan bahwa harga merupakan salah satu penentu utama penerimaan petani, di mana semakin tinggi harga jual kopi, semakin besar pula pendapatan yang diterima petani, dengan asumsi jumlah produksi tetap. Kopi Arabika Welesi yang merupakan kopi organik dan telah dikenal hingga mancanegara memiliki nilai jual yang relatif tinggi dibandingkan kopi dari daerah lain, sehingga fluktuasi harga sangat menentukan besarnya pendapatan petani. Dalam konteks skala ekonomi dan efisiensi, stabilitas harga yang menguntungkan petani akan mendorong mereka untuk meningkatkan skala produksi karena adanya kepastian pasar. Namun demikian, temuan ini juga mengindikasikan bahwa petani sangat rentan terhadap guncangan harga, sehingga diperlukan kebijakan stabilisasi harga dari pemerintah, seperti penetapan harga dasar atau pembentukan lembaga pemasaran bersama, agar pendapatan petani tidak terlalu fluktuatif. Berbeda halnya jika harga tidak stabil, petani akan cenderung enggan melakukan investasi jangka panjang seperti pembelian teknologi atau perluasan lahan karena ketidakpastian pendapatan di masa depan.

Selain harga, variabel jumlah produksi juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani kopi pada tingkat kepercayaan 95 persen maupun 90 persen. Hasil ini memperkuat teori produksi dari Soeharno (2009) yang menyatakan bahwa produksi merupakan hasil dari kombinasi faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output yang bernilai ekonomi, di mana setiap peningkatan jumlah produksi kopi akan secara langsung meningkatkan pendapatan petani karena volume penjualan yang lebih besar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Adriansyah dan Marheni (2017) yang menemukan bahwa produksi merupakan faktor penting dalam menentukan pendapatan petani kopi Arabika di Kintamani, Bangli. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa

peningkatan luas lahan di Distrik Welesi tidak diikuti oleh peningkatan produksi yang proporsional, yang mengindikasikan adanya inefisiensi dalam proses produksi. Oleh karena itu, peningkatan jumlah produksi tidak cukup hanya dengan memperluas lahan, tetapi harus didukung oleh peningkatan produktivitas per hektar melalui penerapan teknologi, penggunaan pupuk yang tepat, serta manajemen tenaga kerja yang efektif. Dengan kata lain, variabel harga dan jumlah produksi merupakan dua sisi mata uang yang sama-sama menentukan pendapatan petani, karena pendapatan secara matematis adalah hasil perkalian antara harga dan jumlah produksi, sehingga wajar jika kedua variabel ini menjadi penentu utama dan memiliki pengaruh paling kuat dibandingkan variabel lainnya.

Berbeda halnya dengan harga dan jumlah produksi, variabel teknologi pengolahan kopi memiliki pengaruh positif tetapi lemah, yaitu hanya signifikan pada tingkat kepercayaan 90 persen dan tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi pengolahan kopi yang diterapkan petani di Distrik Welesi sebenarnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan, namun kontribusinya belum cukup besar untuk dinyatakan signifikan pada taraf kepercayaan yang lebih tinggi. Lemahnya pengaruh ini kemungkinan disebabkan oleh masih terbatasnya akses petani terhadap teknologi pengolahan kopi modern, sehingga sebagian besar petani masih mengolah kopi secara tradisional. Padahal, menurut Chase, Jacobs, dan Aquilano (2005), teknologi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas produksi melalui peningkatan kualitas produk tanpa menaikkan harga. Dalam konteks kopi organik Welesi, penerapan teknologi pengolahan pascapanen yang baik seperti fermentasi, pengeringan yang terkontrol, dan sortasi yang teliti akan meningkatkan kualitas biji kopi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan harga jual dan pendapatan petani. Oleh karena itu, meskipun secara statistik pengaruhnya lemah, secara praktis peningkatan teknologi pengolahan kopi tetap penting untuk dilakukan. Pola yang sama juga terjadi pada variabel tenaga kerja dan modal, yang sama-sama hanya signifikan pada tingkat kepercayaan 90 persen.

Variabel tenaga kerja berpengaruh positif tetapi hanya signifikan pada tingkat kepercayaan 90 persen. Hasil ini berbeda dengan temuan Sari (2011) yang menyatakan tenaga kerja sebagai faktor dominan pada usahatani jagung manis, namun sejalan dengan temuan Adriyansyah dan Marheni (2017) yang menemukan bahwa tenaga kerja berpengaruh tetapi tidak dominan pada perkebunan kopi. Lemahnya pengaruh tenaga kerja di Distrik Welesi dapat disebabkan oleh dua faktor. Pertama, kualitas tenaga kerja yang masih rendah karena keterbatasan pendidikan dan pelatihan teknis budidaya kopi, sehingga penambahan jumlah tenaga kerja tidak serta-merta meningkatkan pendapatan secara signifikan. Kedua, sebagaimana dikemukakan oleh Sumarsono (2009), tenaga kerja tidak hanya diukur dari kuantitas tetapi juga dari kualitas kemampuan manusiawi yang disumbangkan dalam proses produksi. Di Distrik Welesi, peningkatan jumlah tenaga kerja belum diimbangi oleh peningkatan keahlian, sehingga produktivitas tenaga kerja masih rendah. Hal ini mengisyaratkan perlunya program pelatihan dan penyuluhan yang berkelanjutan bagi petani kopi, tidak hanya dalam teknis budidaya tetapi juga dalam manajemen usaha tani. Sementara itu, variabel modal juga menunjukkan pola yang sama, yaitu berpengaruh positif tetapi hanya signifikan pada tingkat kepercayaan 90 persen. Hasil ini mengindikasikan bahwa akses terhadap permodalan memang membantu petani dalam meningkatkan pendapatan, namun pengaruhnya belum kuat karena keterbatasan sumber permodalan formal di Distrik Welesi. Sebagian besar petani masih mengandalkan modal sendiri atau pinjaman informal dengan bunga yang relatif tinggi, sehingga porsi pendapatan yang harus dialokasikan untuk membayar utang cukup besar. Di sisi lain, modal yang tersedia belum cukup untuk membeli teknologi pengolahan kopi modern atau memperluas lahan secara produktif. Padahal, dalam teori produksi, modal merupakan salah satu input penting yang menentukan skala produksi. Keterbatasan modal menyebabkan petani tidak dapat mencapai skala ekonomi yang optimal, sehingga biaya produksi per unit tetap tinggi dan pendapatan tidak maksimal. Oleh karena itu, kebijakan penyediaan kredit usaha tani dengan bunga rendah dan prosedur yang mudah sangat diperlukan untuk meningkatkan akses petani terhadap permodalan.

Temuan paling menarik dari penelitian ini adalah bahwa luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani kopi, baik pada tingkat kepercayaan 95 persen maupun 90 persen. Hasil ini bertentangan dengan teori Mubyarto (1989) yang menyatakan bahwa luas lahan merupakan pabrik hasil pertanian yang menentukan besar kecilnya produksi, serta berbeda dengan temuan Pradnyani (2014) pada perkebunan kakao dan Adriyansyah dan Marheni (2017) pada perkebunan kopi. Tidak signifikannya pengaruh luas lahan di Distrik Welesi mengindikasikan bahwa petani belum mampu mengoptimalkan lahan yang mereka miliki. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui tiga hal yang

saling terkait. Pertama, rendahnya penerapan teknologi pengolahan kopi menyebabkan produktivitas lahan masih rendah, sehingga meskipun lahan luas, produksi yang dihasilkan per hektar tidak optimal. Kedua, keterbatasan modal membuat petani tidak mampu membeli pupuk, bibit unggul, atau peralatan yang diperlukan untuk mengolah lahan secara intensif. Ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan pengelolaan lahan tidak efektif, seperti jarak tanam yang tidak teratur, pemangkasan yang tidak tepat, dan panen yang tidak selektif. Dengan kata lain, ketiga variabel yang hanya signifikan pada tingkat kepercayaan 90 persen (teknologi, tenaga kerja, dan modal) secara kolektif menjadi faktor penghambat optimalisasi lahan. Hal ini juga menjelaskan mengapa peningkatan luas lahan di Distrik Welesi tidak diikuti oleh peningkatan produksi secara proporsional, sebagaimana digambarkan dalam tabel 1.2 tesis ini. Dengan demikian, temuan ini memberikan kritik terhadap teori produksi klasik yang cenderung mengasumsikan bahwa lahan adalah faktor produksi yang selalu menentukan, karena dalam kondisi teknologi rendah, modal terbatas, dan tenaga kerja tidak terampil, luasan lahan tidak serta-merta menjamin tingginya pendapatan.

Meskipun secara parsial hanya dua variabel yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen, namun secara simultan keenam variabel independen (harga, jumlah produksi, teknologi, tenaga kerja, modal, dan luas lahan) berpengaruh sangat signifikan terhadap pendapatan petani kopi, dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,879. Hal ini berarti bahwa 87,9 persen variasi pendapatan petani dapat dijelaskan oleh keenam variabel tersebut secara bersama-sama. Nilai yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik (Ghozali, 2018), sekaligus membuktikan bahwa pendapatan petani kopi merupakan fenomena multidimensi yang tidak dapat dijelaskan oleh satu atau dua variabel saja. Keenam variabel tersebut saling terkait dan berinteraksi satu sama lain dalam suatu sistem yang kompleks. Misalnya, modal yang cukup memungkinkan petani membeli teknologi pengolahan modern, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas produksi dan harga jual. Demikian pula, tenaga kerja yang terampil akan lebih efektif dalam mengolah lahan yang luas, sehingga produktivitas meningkat. Sebaliknya, jika salah satu variabel tidak berfungsi optimal, maka variabel lainnya juga akan terhambat. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi sangat diperlukan dalam upaya peningkatan pendapatan petani kopi di Distrik Welesi, tidak cukup hanya dengan fokus pada satu atau dua variabel saja.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tentang skala ekonomi dan efisiensi dalam konteks perkebunan kopi di wilayah pegunungan Papua yang memiliki karakteristik unik. Temuan bahwa luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan memberikan kritik terhadap teori produksi klasik yang cenderung mengasumsikan lahan sebagai faktor produksi yang selalu menentukan, sekaligus memperkuat pentingnya peran teknologi, modal, dan kualitas tenaga kerja dalam meningkatkan efisiensi usaha tani. Secara praktis, hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa prioritas kebijakan peningkatan pendapatan petani kopi di Distrik Welesi sebaiknya tidak hanya terfokus pada perluasan lahan, tetapi lebih pada peningkatan produktivitas melalui perbaikan teknologi pengolahan kopi, akses permodalan yang mudah dan murah, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan penyuluhan berkelanjutan. Stabilitas harga dan peningkatan volume produksi juga harus menjadi perhatian utama karena kedua variabel ini terbukti paling dominan pengaruhnya pada tingkat kepercayaan 95 persen. Selain itu, kebijakan yang terintegrasi sangat diperlukan karena keenam variabel tersebut saling terkait dan berpengaruh secara simultan. Pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Pemerintah Provinsi Papua diharapkan dapat menggunakan temuan ini sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan program penyuluhan, pendampingan, dan pengembangan agribisnis kopi yang lebih tepat sasaran.

Perlu diakui bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati sebelum hasilnya digeneralisasikan. Pertama, penggunaan skala ordinal melalui kuesioner mungkin tidak sepenuhnya menangkap nilai riil dari variabel-variabel yang diukur, seperti pendapatan dalam rupiah atau luas lahan dalam hektar, sehingga hasil yang diperoleh lebih menggambarkan persepsi petani daripada nilai riil di lapangan. Kedua, penelitian ini hanya melibatkan 96 responden di satu distrik, yaitu Distrik Welesi, sehingga generalisasi hasil penelitian ke wilayah lain di Kabupaten Jayawijaya atau provinsi lain perlu dilakukan dengan hati-hati karena karakteristik geografis, sosial, dan budaya dapat berbeda secara signifikan. Ketiga, masih terdapat 12,1 persen variasi pendapatan yang dijelaskan oleh variabel lain di luar model, seperti faktor cuaca, hama penyakit, kebijakan pemerintah, kondisi infrastruktur transportasi, serta akses pasar yang belum tercakup dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel tersebut serta menggunakan skala rasio

dengan pengukuran yang lebih akurat, misalnya dengan mengukur pendapatan dalam rupiah, luas lahan dalam hektar, dan jumlah tenaga kerja dalam orang per hari kerja. Namun demikian, dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,879, model regresi dalam penelitian ini sudah tergolong sangat baik dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu ekonomi pertanian serta kebijakan peningkatan kesejahteraan petani kopi di Papua. Penelitian ini juga membuka peluang bagi studi lanjutan yang lebih mendalam, misalnya dengan memasukkan variabel moderasi seperti peran penyuluh pertanian atau variabel mediasi seperti efisiensi penggunaan input, untuk lebih memahami mekanisme pengaruh faktor-faktor produksi terhadap pendapatan petani kopi di wilayah pegunungan Papua.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap enam variabel yang diduga mempengaruhi pendapatan usaha tani perkebunan kopi Arabika di Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya, dapat disimpulkan bahwa harga dan jumlah produksi merupakan dua faktor yang paling dominan dan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani. Kedua variabel ini terbukti memiliki pengaruh positif yang kuat dan signifikan pada tingkat kepercayaan yang tinggi, yang berarti bahwa setiap peningkatan harga jual kopi maupun peningkatan jumlah produksi akan secara langsung dan nyata meningkatkan pendapatan petani. Temuan ini sejalan dengan konsep dasar ekonomi bahwa pendapatan merupakan perkalian antara harga dan jumlah produksi, sehingga kedua faktor ini menjadi penentu utama kesejahteraan petani kopi di Distrik Welesi.

Sementara itu, variabel teknologi pengolahan kopi, tenaga kerja, dan modal menunjukkan pengaruh yang lebih lemah, yaitu hanya signifikan pada tingkat kepercayaan yang lebih longgar namun tidak signifikan pada tingkat kepercayaan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga faktor tersebut sebenarnya memiliki pengaruh terhadap pendapatan petani, namun pengaruhnya belum cukup kuat karena akses petani terhadap teknologi modern masih terbatas, kualitas tenaga kerja masih rendah meskipun jumlahnya cukup, serta keterbatasan sumber permodalan formal yang mudah dijangkau. Adapun variabel luas lahan justru terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani, yang berarti bahwa lahan yang luas tanpa didukung oleh teknologi, modal, dan tenaga kerja yang memadai tidak akan memberikan kontribusi berarti terhadap peningkatan pendapatan.

Secara keseluruhan, meskipun secara parsial hanya harga dan jumlah produksi yang memiliki pengaruh kuat, namun secara bersama-sama keenam variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani kopi. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan petani merupakan fenomena multidimensi yang memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi. Dengan demikian, kebijakan peningkatan pendapatan petani kopi di Distrik Welesi sebaiknya tidak hanya terfokus pada perluasan lahan, tetapi lebih diarahkan pada stabilisasi harga, peningkatan produktivitas, serta perbaikan akses petani terhadap teknologi, permodalan, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan penyuluhan berkelanjutan.

### **2. Saran-Saran**

Secara teoretis, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan menambah jumlah responden agar hasil penelitian lebih representatif dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas. Penelitian mendatang juga sebaiknya menambahkan variabel-variabel lain yang belum diuji dalam penelitian ini, seperti faktor cuaca, hama penyakit, kebijakan pemerintah, kondisi infrastruktur, akses pasar, serta peran penyuluh pertanian, yang dapat ditempatkan sebagai variabel independen tambahan, variabel moderasi, atau variabel mediasi. Selain itu, penggunaan skala rasio dengan pengukuran nilai riil dalam satuan seperti rupiah, hektar, kilogram, dan hari kerja sangat dianjurkan untuk menggantikan skala ordinal yang hanya mengukur persepsi petani, sehingga hasil analisis lebih akurat dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Sementara itu secara praktis, petani kopi di Distrik Welesi disarankan untuk meningkatkan kualitas biji kopi, membentuk kelompok tani atau koperasi untuk memperkuat posisi tawar dalam menentukan harga, serta mengadopsi teknologi pengolahan modern melalui pelatihan dan akses permodalan yang difasilitasi pemerintah. Pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya dan Pemerintah Provinsi Papua disarankan untuk menstabilkan harga kopi melalui kebijakan harga dasar dan kemitraan

dengan industri pengolahan, mengalihkan fokus dari perluasan lahan ke intensifikasi pertanian dengan meningkatkan produktivitas per hektar, serta menyediakan program pelatihan berkelanjutan, bantuan alat teknologi, dan kredit usaha tani berbunga rendah dengan prosedur sederhana. Pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga keuangan juga disarankan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan petani, memperluas program pendampingan, serta menyediakan produk kredit yang ramah bagi petani kopi, sehingga melalui sinergi semua pihak, pendapatan petani kopi di Distrik Welesi dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriyansyah, D., & Marheni, A. A. I. N. (2017). Analisis skala ekonomis dan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha perkebunan kopi Arabika di Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 5(2), 112-125.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik kopi Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Carpenter, M. A., & Sanders, W. G. (2007). *Strategic management: A dynamic perspective*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Chase, R. B., Jacobs, F. R., & Aquilano, N. J. (2005). *Operations management for competitive advantage* (11th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Daniel, M. (2001). *Pengantar ekonomi pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Diarawati, N. L. (2011). *Skala ekonomis dan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada usahatani cabai rawit di Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar*. Skripsi. Universitas Udayana, Denpasar.
- Fauzi, M. (2007). *Ekonomi pertanian: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mubyarto. (1989). *Pengantar ekonomi pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Munandar, M. (2001). *Ekonomi industri*. Yogyakarta: BPFE.
- Pearson, J. N., & Wisner, J. D. (1993). The impact of economies of scale on supply chain management. *Journal of Business Logistics*, 14(2), 45-68.
- Pradnyani, N. K. (2014). *Analisis skala ekonomis dan efisiensi pada usaha perkebunan kakao di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung*. Skripsi. Universitas Udayana, Denpasar.
- Priyatno, D. (2012). *Cara cepat belajar analisis data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rosyidi, S. (2004). *Pengantar teori ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sari, N. P. (2011). *Skala ekonomis dan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada usahatani jagung manis di Subak Buaji Kelurahan Kesiman Kecamatan Denpasar Timur*. Skripsi. Universitas Udayana, Denpasar.
- Sekaran, U. (2009). *Research methods for business: A skill building approach* (4th ed.). New York: John Wiley & Sons.
- Soeharno. (2009). *Teori produksi dan aplikasinya dalam ekonomi pertanian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sriyoto, dkk. (2007). *Efisiensi ekonomi usahatani*. Bengkulu: Universitas Bengkulu Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, S. (2009). *Teori dan kebijakan ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syam, A. (2020). *Efisiensi dan efektivitas dalam manajemen usaha*. Makassar: Universitas Hasanuddin Press.

**ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN MANOKWARI****Yopi Suabey<sup>1</sup>****Halomoan Hutajulu<sup>2</sup>**  
*halomoan.h@gmail.com***ABSTRACT**

*This study aims to analyze the income level of noken (traditional Papuan woven bag) business actors in Manokwari Regency, identify the inhibiting and supporting factors in the empowerment process of cooperatives and noken business actors, and formulate appropriate strategies to increase the income of noken sellers in Manokwari Regency. The analytical methods used in this research consist of two stages: calculation of total production costs to measure the net income of craftsmen, and SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) to identify internal and external factors affecting the noken handicraft business. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation involving 27 noken craftsman respondents selected through purposive sampling with the criterion of having been in business for at least one year. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the average income of noken craftsmen per production cycle is IDR 4,617,308 with a net income after deducting costs of IDR 4,070,769, where the revenue received is the product of the number of noken produced multiplied by the selling price at the time of production. The development strategy for the noken bag handicraft industry is based on two approaches: a strategy based on internal-external matrix analysis and a combination of SWOT matrix strategies, which shows that the priority strategy to be applied is the SO (Strengths-Opportunities) strategy, which utilizes strengths to take advantage of opportunities through three main indicators, namely capital, raw materials, and marketing. Noken sellers have several significant strengths such as easy access to raw materials, high skills, and low production costs, and can take advantage of existing opportunities including supportive government policies and increasing demand for noken bags. However, they also face weaknesses such as a lack of understanding of financial literacy and digital marketing, as well as threats from competition with modern bags and difficulties in obtaining natural raw materials, thus requiring a comprehensive strategy to overcome weaknesses and threats while maximizing existing strengths and opportunities.*

*Keywords: Strategy, Income, MSMEs, Noken, SWOT Analysis*

**PENDAHULUAN**

Perekonomian nasional Indonesia menempatkan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar fundamental yang memiliki peran strategis dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), terutama dalam menghadapi tantangan Era Industri 4.0. Sebagaimana dikemukakan oleh Amri (2020), UMKM merupakan penggerak ekonomi yang eksistensinya wajib dioptimalkan melalui kebijakan pemerintah yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Karakteristik UMKM yang bersifat padat karya menjadikannya solusi efektif bagi perbaikan ekonomi karena tidak selalu mensyaratkan tingkat pendidikan tinggi atau modal besar, melainkan lebih mengandalkan pemanfaatan teknologi madya dan keterampilan yang bersifat turun-temurun. Namun, untuk bertransformasi menjadi entitas yang kompetitif, UMKM memerlukan proses pemberdayaan yang mencakup aspek penciptaan iklim yang memungkinkan potensi berkembang (enabling), penguatan daya saing sumber daya (empowering), serta perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak seimbang (protecting).

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>2</sup> Staf Dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM sangat bergantung pada integrasi strategi internal dan dukungan eksternal yang tepat. Zonggonau dkk. (2021) di Kabupaten Mimika mengidentifikasi bahwa strategi pengembangan industri tas noken yang paling tepat adalah strategi SO (Strengths-Opportunities), yaitu memanfaatkan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal. Temuan ini diperkuat oleh Sawir dkk. (2021) yang membuktikan bahwa pemberdayaan berbasis digital mampu meningkatkan pendapatan pengrajin noken secara signifikan. Meski demikian, tantangan serius tetap membayangi sebagaimana diungkapkan oleh Dedi (2016) dan Amir (2022) mengenai rendahnya kualitas SDM, keterbatasan modal, serta masalah regenerasi pengrajin. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Papua, karena penelitian Rio dkk. (2017) di Palembang dan Kusuma & Setiawan (2012) di Bogor mengonfirmasi bahwa faktor usia, rendahnya tingkat pendidikan, serta kelemahan manajemen keuangan merupakan hambatan fundamental UMKM di Indonesia secara umum.

Kondisi tersebut tercermin nyata pada realitas ekonomi di Kabupaten Manokwari saat ini. Berdasarkan laporan pemetaan Lembaga Keuangan Mikro oleh UNIPA dan Bank Indonesia, meskipun usaha mikro mendominasi struktur usaha sebesar 62,5%, partisipasi pengusaha asli Papua masih tercatat sangat minim. Salah satu potensi ekonomi kreatif yang menjadi representasi kearifan lokal adalah kerajinan Noken, tas tradisional yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda. Noken bukan sekadar produk kerajinan, melainkan simbol identitas dan martabat perempuan Papua yang pengerjaannya dilakukan secara turun-temurun. Saat ini, banyak Mama-mama Papua di Manokwari memproduksi dan menjual noken di sepanjang jalan raya, namun pengelolannya masih bersifat subsisten dengan pendapatan yang fluktuatif dan tidak menentu.

Para pengrajin noken di Manokwari menghadapi tantangan kompleks, mulai dari keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal hingga persaingan ketat dengan produk tas modern. Meskipun terdapat peluang unik melalui kebijakan pemerintah daerah yang mewajibkan penggunaan noken pada hari tertentu, para pengrajin masih kesulitan dalam hal literasi keuangan dan pemasaran digital. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat krusial untuk dilakukan guna menggabungkan aspek penguatan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dengan aspek pelestarian budaya. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pendapatan pelaku usaha, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung, serta merumuskan strategi peningkatan pendapatan yang konkret berbasis analisis SWOT guna mengubah peluang kebijakan menjadi kesejahteraan riil bagi pengrajin noken di Kabupaten Manokwari.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan lokasi di Kabupaten Manokwari, tepatnya di Distrik Manokwari Kota, yang dilaksanakan selama dua bulan. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, wawancara langsung, dan observasi lapangan, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi dan studi kepustakaan seperti profil daerah dan data statistik dari Badan Pusat Statistik. Populasi penelitian adalah seluruh pengrajin noken di Kabupaten Manokwari, dengan sampel sebanyak 27 orang yang diambil menggunakan teknik purposive sampling, yaitu kriteria pengrajin yang telah menjalankan usaha minimal satu tahun ke atas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi untuk mengamati langsung kegiatan produksi dan penjualan, wawancara untuk menggali informasi secara mendalam dari responden, serta dokumentasi untuk melengkapi dan memverifikasi keabsahan data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah analisis pendapatan yang menghitung total biaya produksi ( $TC = FC + VC$ ), total penerimaan ( $TR = Y \times Py$ ), dan pendapatan bersih ( $Pd = TR - TC$ ) untuk mengetahui besarnya pendapatan yang benar-benar diterima pengrajin. Tahap kedua adalah analisis SWOT yang diawali dengan menyusun matriks IFAS untuk faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan matriks EFAS untuk faktor eksternal (peluang dan ancaman), di mana setiap faktor diberi bobot dan rating untuk menghasilkan skor tertimbang. Hasil analisis IFAS dan EFAS kemudian diplot ke dalam diagram kartesius untuk menentukan posisi usaha, yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan empat kombinasi strategi yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT. Definisi operasional menetapkan bahwa pendapatan adalah laba yang diperoleh dari kegiatan usaha, sedangkan UMKM adalah unit usaha produktif mandiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1. Hasil Penelitian**

Penelitian ini diawali dengan penyajian identitas responden untuk memberikan gambaran tentang karakteristik demografis para pengrajin noken di Kabupaten Manokwari. Berdasarkan tabel 4.1 yang menyajikan data jenis kelamin responden, ditemukan bahwa seluruh responden berjumlah 27 orang adalah perempuan atau sebesar 100 persen, sementara tidak ada responden laki-laki sama sekali. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa kerajinan noken merupakan kegiatan usaha yang secara tradisional dan kultural memang didominasi oleh perempuan Papua, di mana keterampilan membuat noken diajarkan secara turun-temurun dari ibu kepada anak perempuannya sebagai bagian dari proses pendewasaan dan persiapan menuju pernikahan.

**Tabel 1. Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	0	0,00%
Perempuan	27	100%
Total	27	100%

Sumber: Data diolah, 2024

Selanjutnya, Tabel 2 menyajikan tingkat pendidikan responden yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu sebanyak 12 orang atau 37,93 persen dari keseluruhan responden. Responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 10 orang atau 34,48 persen, sementara responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 5 orang atau 17,24 persen. Data ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan para pengrajin noken tergolong rendah hingga menengah, yang berimplikasi pada keterbatasan mereka dalam mengakses informasi, mengelola keuangan usaha, serta memanfaatkan teknologi pemasaran digital.

**Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden**

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	5	17,24%
SMP	12	37,93%
SMA	10	34,48%
Total	27	100%

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 3 yang menyajikan umur responden, ditemukan bahwa mayoritas responden berada pada kelompok usia di atas 40 tahun, yaitu sebanyak 18 orang atau 62,07 persen. Responden dengan usia 30 hingga 40 tahun berjumlah 6 orang atau 27,59 persen, sementara responden dengan usia 20 hingga 30 tahun hanya 3 orang atau 10,34 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa generasi muda Papua, terutama perempuan usia produktif, sudah mulai jarang yang menekuni kerajinan noken. Hal ini mengonfirmasi kekhawatiran yang juga diungkapkan oleh penelitian Januar Arie (2017) bahwa proses pewarisan kemahiran dari generasi tua ke generasi muda tidak berjalan maksimal, sehingga kerajinan noken terancam punah jika tidak ada upaya regenerasi yang serius.

**Tabel 3. Umur Responden**

Umur	Jumlah	Persentase
20-30	3	10,34%
30-40	6	27,59%
>40	18	62,07%
Total	27	100%

Sumber: Data diolah, 2024

Selanjutnya berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa rata-rata modal awal yang digunakan untuk membuka usaha kerajinan tas noken berkisar antara Rp200.000 hingga Rp500.000 dengan rata-rata sebesar Rp462.963. Seluruh responden menggunakan modal sendiri dan tidak ada yang menggunakan jasa simpan pinjam untuk tambahan modal usaha. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk benang wol rata-rata sebesar Rp35.000 per sekali produksi, sementara biaya untuk benang nilon rata-rata sebesar Rp50.000, sehingga total biaya yang dikeluarkan rata-rata mencapai Rp547.963.

**Tabel 4. Rata-Rata Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Produksi Noken**

Modal	Benang Wol	Benang Nilon	Total
Rp462.963	Rp35.000	Rp50.000	Rp547.963

Sumber Data: Data diolah, 2024

Tabel 5 berikut ini menunjukkan bahwa harga jual untuk kedua jenis noken, baik yang terbuat dari benang wol maupun benang nilon, memiliki harga rata-rata yang sama yaitu Rp350.000 per buah. Harga yang relatif sama ini menunjukkan bahwa dari perspektif konsumen, nilai atau kualitas kedua jenis noken tersebut dipersepsikan tidak berbeda secara signifikan, sehingga pengrajin tidak dapat membedakan harga berdasarkan jenis bahan baku yang digunakan.

**Tabel 5. Rata-Rata Harga Noken**

Noken Benang Wol	Noken Benang Nilon
Rp350.000	Rp350.000

Sumber Data: Data diolah, 2024

Tabel 6 di bawah ini menyajikan data rata-rata total penerimaan dari penjualan noken. Rata-rata produksi noken benang wol dalam sekali produksi adalah sebanyak 6 buah, sementara noken benang nilon sebanyak 7 buah. Dengan harga jual masing-masing Rp350.000 per buah, maka rata-rata penerimaan dari penjualan noken benang wol adalah sebesar Rp2.073.077, sedangkan penerimaan dari noken benang nilon sebesar Rp2.544.231. Total penerimaan keseluruhan dari kedua jenis noken mencapai Rp4.617.308 dalam sekali periode produksi.

**Tabel 6. Rata-Rata Total Penerimaan**

Keterangan	Noken Benang Wol	Noken Benang Nilon
Harga Noken	Rp350.000	Rp350.000
Jumlah Noken Yang Diproduksi	6 buah	7 buah
Total Penerimaan	Rp2.073.077	Rp2.544.231

Sumber Data: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 7, pendapatan bersih pengrajin noken di Kabupaten Manokwari untuk sekali periode produksi dihitung dengan mengurangkan total biaya yang dikeluarkan (Rp547.963) dari total penerimaan (Rp4.617.308), sehingga diperoleh pendapatan bersih rata-rata sebesar Rp4.070.769. Besarnya pendapatan ini sangat tergantung pada hasil produksi dan harga jual noken. Apabila hasil produksi dan harga jual tinggi, maka penerimaan yang didapatkan akan semakin besar, dan sebaliknya jika hasil produksi dan harga jual rendah maka penerimaan yang diperoleh juga rendah.

**Tabel 7. Rata-Rata Total Pendapatan**

Total Penerimaan	Biaya Yang Dikeluarkan	Pendapatan Bersih
Rp4.617.308	Rp547.963	Rp4.070.769

Sumber Data: Data diolah, 2024

Selanjutnya, penelitian ini melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung usaha pengrajin noken. Tabel 5.5 menyajikan matriks faktor internal dan eksternal berdasarkan pengelompokan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Faktor kekuatan yang teridentifikasi antara lain bahan baku yang mudah diperoleh, produksi yang hanya memerlukan modal sedikit, jumlah produksi yang banyak dengan alat sederhana, lokasi pemasaran yang

fleksibel, serta keterampilan pengrajin yang sangat baik. Faktor kelemahan meliputi kebanyakan pengrajin tidak memiliki buku tabungan atau rekening bank, motif tas noken yang kurang menarik perhatian pembeli, penggunaan alat-alat sederhana, kebutuhan bahan baku dengan warna yang beragam, serta kurangnya pemahaman dalam mempromosikan penjualan. Faktor peluang terdiri dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan PNS dan siswa memakai tas noken pada hari Kamis dan Jumat, permintaan yang meningkat, hasil penjualan yang lebih tinggi dari modal yang dikeluarkan, serta kemampuan menjual 5 hingga 10 buah noken setiap bulannya. Faktor ancaman mencakup persaingan dengan tas modern, kurangnya pemahaman promosi melalui pasar online, persaingan motif dan jenis antar penjual, kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk modal dan fasilitas, serta semakin sulitnya mendapatkan bahan baku dari hasil alam.

**Tabel 8. Matriks Faktor Internal Dan Faktor Eksternal**

Faktor-Faktor Internal	
Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
K1. Bahan baku mudah diperoleh	L1. Tidak punya buku tabungan/rekening
K2. Produksi hanya memerlukan modal sedikit	L2. Motif kurang menarik pembeli
K3. Jumlah produksi banyak dengan alat sederhana	L3. Hanya gunakan alat sederhana
K4. Lokasi pemasaran dapat dilakukan dimana saja	L4. Perlu banyak warna bahan baku
K5. Keterampilan pengrajin sangat baik	L5. Kurang paham promosi penjualan
Faktor-Faktor Eksternal	
Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
P1. Kebijakan pemerintah (PNS dan siswa wajib pakai noken)	A1. Persaingan dengan tas modern
P2. Permintaan tas noken meningkat	A2. Kurang paham promosi online
P3. Hasil penjualan lebih tinggi dari modal	A3. Persaingan motif antar penjual
P4. Setiap bulan terjual 5-10 buah	A4. Dukungan pemerintah kurang
P5. Harga tas noken tinggi	A5. Bahan baku alam semakin sulit

Sumber: Data diolah, 2024

Setelah faktor-faktor internal dan eksternal teridentifikasi, berikutnya dilakukan analisis matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) sebagaimana yang disajikan pada tabel 8 berikut ini.

**Tabel 8. Evaluasi IFAS dan EFAS**

Evaluasi IFAS				Evaluasi EFAS			
	Bobot	Rating	Skor		Bobot	Rating	Skor
<b>Kekuatan</b>				<b>Peluang</b>			
K1	0,10	4	0,40	P1	0,07	3	0,22
K2	0,11	5	0,54	P2	0,08	4	0,30
K3	0,10	3	0,29	P3	0,07	2	0,14
K4	0,10	4	0,40	P4	0,08	3	0,23
K5	0,10	4	0,42	P5	0,11	5	0,57
<b>Total Kekuatan</b>	<b>0,51</b>		<b>2,05</b>	<b>Total Peluang</b>	<b>0,41</b>		<b>1,46</b>
<b>Kelemahan</b>				<b>Ancaman</b>			
L1	0,10	4	0,41	A1	0,12	4	0,50
L2	0,10	4	0,38	A2	0,12	3	0,35
L3	0,09	3	0,27	A3	0,13	5	0,64
L4	0,10	4	0,41	A4	0,11	5	0,53
L5	0,10	4	0,39	A5	0,12	5	0,59
<b>Total Kelemahan</b>	<b>0,49</b>		<b>1,87</b>	<b>Total Ancaman</b>	<b>0,59</b>		<b>2,60</b>
<b>Total IFAS</b>	<b>1,00</b>		<b>3,92</b>	<b>Total EFAS</b>	<b>1</b>		<b>4,06</b>
<b>Titik Sumbu Horisontal X</b>			<b>0,18</b>	<b>Titik Sumbu Horisontal Y</b>			<b>1,14</b>

Sumber: Data diolah, 2024

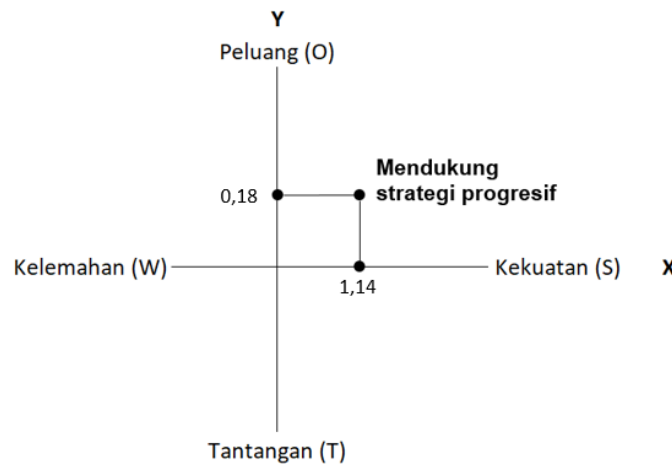
Dari hasil analisis, total skor perkalian antara bobot dan rating untuk faktor kekuatan adalah 2,05, sementara total skor untuk faktor kelemahan adalah 1,87. Selisih antara kekuatan dan kelemahan adalah 0,18 (dibulatkan menjadi 1,85 dalam tesis). Hasil rata-rata tertimbang menunjukkan angka di atas 2,5 yang mengindikasikan bahwa posisi internal pengrajin noken di Kabupaten Manokwari

tergolong kuat. Artinya, secara internal, para pengrajin memiliki kekuatan yang lebih dominan dibandingkan kelemahan yang mereka miliki.

Selanjutnya, analisis matriks EFAS (External Factor Analysis Summary) pada Tabel 8 menunjukkan bahwa total skor untuk faktor peluang adalah 1,46, sementara total skor untuk faktor ancaman adalah 2,60. Selisih antara peluang dan ancaman adalah 1,14. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengrajin noken di Kabupaten Manokwari cukup responsif dalam memanfaatkan peluang yang ada serta mampu mengelola ancaman dengan cukup baik.

Berdasarkan hasil perhitungan faktor internal dan eksternal, diperoleh nilai kekuatan (S) sebesar 2,05, kelemahan (W) sebesar 1,87, peluang (O) sebesar 1,46, dan ancaman (T) sebesar 2,60. Selisih kekuatan dikurangi kelemahan adalah positif sebesar 0,18, sementara selisih ancaman dikurangi peluang juga positif sebesar 1,14. Ketika diplotkan ke dalam diagram kartesius SWOT, posisi usaha pengrajin noken berada pada kuadran I (Agresif/Growth), lihat Gambar 1, yang berarti bahwa pengrajin noken di Kabupaten Manokwari memiliki kekuatan yang baik dan mampu memanfaatkan peluang yang ada, sehingga strategi yang tepat adalah strategi yang berorientasi pada pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy).

**Gambar 1. Diagram SWOT**



Tabel 10 menyajikan matriks SWOT lengkap yang merumuskan empat kombinasi strategi. Strategi SO (memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang) meliputi mengusahakan keterbatasan bahan baku dari hasil alam dengan memanfaatkan bahan baku pabrik, memanfaatkan modal kecil dengan peralatan sederhana untuk menghasilkan nilai jual tinggi, meningkatkan inovasi dan kualitas produksi dengan memanfaatkan permintaan tinggi dan kebijakan pemerintah, serta meningkatkan keterampilan dan semangat pengrajin seiring dengan penjualan 5-10 buah per bulan.

**Tabel 10. Matriks SWOT Analisis Strategi Usaha Pengrajin Noken**

	<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Kelemahan (W)</b>
<b>Peluang (O)</b>	<p><b>Strategi SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusahakan keterbatasan bahan baku alam dengan memanfaatkan bahan baku pabrik</li> <li>2. Memanfaatkan modal kecil dengan alat sederhana untuk nilai jual tinggi</li> <li>3. Meningkatkan inovasi dan kualitas produksi dengan kebijakan pemerintah</li> <li>4. Meningkatkan keterampilan dengan target penjualan 5-10 buah/bulan</li> </ol>	<p><b>Strategi WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan produksi dengan efisiensi bahan baku</li> <li>2. Mengembangkan inovasi motif menarik dengan dukungan kebijakan pemerintah</li> <li>3. Bantuan teknologi dan pelatihan promosi dari pemerintah</li> </ol>

	<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Kelemahan (W)</b>
<b>Ancaman (T)</b>	<p><b>Strategi ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan produksi meski fasilitas dan modal terbatas</li> <li>2. Beralih ke bahan baku pabrik karena bahan alam terbatas</li> <li>3. Mencari lokasi penjualan lebih menguntungkan</li> <li>4. Menggunakan modal kecil untuk hindari kerugian</li> </ol>	<p><b>Strategi WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan promosi online dan offline</li> <li>2. Pembelajaran pengelolaan modal dan keuangan</li> <li>3. Inovasi desain hadapi persaingan</li> <li>4. Bantuan alat rajut dari pemerintah</li> </ol>

Sumber: Data diolah, 2024

Strategi WO (memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang) mencakup peningkatan produksi dengan memanfaatkan bahan baku seefisien mungkin, pengembangan inovasi motif yang lebih menarik dengan dukungan kebijakan pemerintah, serta bantuan pemerintah dalam bentuk teknologi dan pelatihan promosi penjualan. Strategi ST (menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman) meliputi optimalisasi jumlah produksi meskipun dengan fasilitas dan modal terbatas, mengusahakan keterbatasan bahan baku alam dengan beralih ke bahan baku pabrik, mencari lokasi penjualan yang lebih menguntungkan, serta mengusahakan penggunaan modal yang sedikit untuk menghindari kerugian akibat persaingan. Strategi WT (meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman) meliputi pembinaan promosi online dan offline, pembelajaran pengelolaan modal dan keuangan, penciptaan inovasi desain baru untuk menghadapi persaingan, serta bantuan pemerintah berupa alat rajut untuk mempermudah proses produksi dan mengurangi penggunaan bahan baku berlebihan.

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa rata-rata pendapatan pengrajin noken di Kabupaten Manokwari untuk sekali produksi adalah sebesar Rp4.617.308 dengan pendapatan bersih setelah dikurangi biaya sebesar Rp4.070.769. Posisi strategis pengrajin noken berada pada kuadran I (agresif/growth) yang berarti mereka memiliki kekuatan yang baik dan mampu memanfaatkan peluang, sehingga strategi prioritas yang sebaiknya diterapkan adalah strategi SO. Penjual tas noken memiliki kekuatan signifikan seperti akses mudah ke bahan baku, keterampilan tinggi, dan biaya produksi rendah, serta dapat memanfaatkan peluang seperti kebijakan pemerintah yang mendukung dan permintaan yang meningkat. Namun demikian, mereka juga menghadapi kelemahan seperti kurangnya pemahaman tentang literasi keuangan dan pemasaran digital, serta ancaman dari persaingan dengan tas modern dan kesulitan mendapatkan bahan baku alami. Oleh karena itu, strategi peningkatan pendapatan harus dirancang untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada, sambil secara simultan mengatasi kelemahan dan mengurangi ancaman yang dihadapi.

## 2. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis pendapatan, diketahui bahwa rata-rata pendapatan bersih pengrajin noken di Kabupaten Manokwari mencapai Rp4.070.769 per sekali produksi dengan modal awal hanya sekitar Rp462.963 yang seluruhnya berasal dari modal sendiri tanpa akses ke lembaga keuangan formal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rumetna dkk (2020) di Papua yang menunjukkan bahwa keuntungan maksimal penjual noken hanya mencapai Rp300.000 per minggu, namun angka pendapatan di Manokwari tergolong lebih tinggi berkat adanya kebijakan pemerintah daerah yang mewajibkan penggunaan noken. Potensi ekonomi yang cukup menjanjikan ini ternyata menyimpan tantangan struktural, karena karakteristik responden yang seluruhnya perempuan (100 persen) dengan mayoritas berusia di atas 40 tahun (62,07 persen) dan berpendidikan SMP hingga SMA mengindikasikan adanya ancaman serius terhadap regenerasi pengrajin di masa depan. Kondisi ini memperkuat temuan Januar Arie (2017) bahwa proses pewarisan kemahiran membuat noken dari generasi tua ke generasi muda tidak berjalan maksimal, serta penelitian Rio, Chodijah, dan Yunisvita (2017) di Palembang yang menemukan bahwa usia berpengaruh negatif terhadap pendapatan pekerja perempuan, sementara tingkat pendidikan berpengaruh positif, sehingga rendahnya pendidikan pengrajin noken berimplikasi pada keterbatasan literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi digital.

Hasil analisis SWOT berhasil mengidentifikasi keseimbangan antara faktor pendukung dan penghambat usaha pengrajin noken. Di satu sisi, kekuatan utama seperti kemudahan akses bahan baku, modal usaha yang kecil, keterampilan pengrajin yang tinggi, serta fleksibilitas lokasi pemasaran menjadi modal berharga yang dimiliki para pengrajin, sementara di sisi lain, peluang terbesar yang tersedia adalah kebijakan pemerintah Kabupaten Manokwari yang mewajibkan PNS dan siswa memakai noken pada hari Kamis dan Jumat. Temuan ini mendukung penelitian Zonggonau, Rahayu, dan Maspaitella (2021) di Mimika yang merekomendasikan strategi SO sebagai prioritas pengembangan industri noken melalui tiga indikator utama yaitu permodalan, bahan baku, dan pemasaran. Namun demikian, kelemahan signifikan seperti kebanyakan pengrajin tidak memiliki rekening bank, motif noken yang kurang menarik perhatian pembeli, serta kurangnya pemahaman dalam mempromosikan produk secara digital, ditambah ancaman dari persaingan dengan tas modern dan semakin sulitnya memperoleh bahan baku alami, menjadi faktor-faktor yang dapat menghambat optimalisasi pemanfaatan peluang. Kondisi ini sangat relevan dengan temuan Asti Iriani Amir (2022) di Jayapura bahwa rendahnya SDM, kurangnya pemanfaatan teknologi, belum tersedianya tempat berjualan strategis, serta keterbatasan modal menjadi faktor penghambat utama pemberdayaan pengrajin noken, serta penelitian IC Kusuma dan AB Setiawan (2012) di Bogor yang menemukan bahwa masih banyak UMKM belum mampu menyusun laporan keuangan dan merencanakan permodalan dengan baik.

Hasil perhitungan matriks IFAS dan EFAS menunjukkan total skor kekuatan 2,05, kelemahan 1,87, peluang 1,46, dan ancaman 2,60, yang ketika diplotkan ke dalam diagram kartesius menempatkan posisi usaha pengrajin noken pada kuadran I (agresif/growth oriented strategy), sebuah temuan yang sejalan dengan penelitian Mega Satria (2019) di Payakumbuh yang juga merekomendasikan strategi agresif bagi industri rumah tangga kerajinan. Posisi ini mengindikasikan bahwa meskipun ancaman dari lingkungan eksternal lebih besar dibandingkan peluang yang tersedia, kekuatan internal yang lebih dominan dibandingkan kelemahan memungkinkan para pengrajin untuk tetap tumbuh dan berkembang, sehingga strategi yang paling tepat adalah strategi SO yaitu memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Implikasinya, pengrajin perlu segera melakukan diversifikasi motif dan desain noken agar lebih menarik bagi konsumen modern, sebagaimana direkomendasikan oleh Sawir dkk (2021) di Jayapura Selatan bahwa pemberdayaan berbasis digital dan diversifikasi produk unggulan mampu meningkatkan partisipasi dan pendapatan pengrajin. Selain itu, pengrajin juga perlu mengikuti pelatihan literasi keuangan dan pemasaran digital untuk mengatasi kelemahan yang ada, sementara pemerintah daerah dituntut memainkan peran krusial sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator, sebagaimana ditemukan oleh Tumija (2022) di Cimahi bahwa sinergi antara peran pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan pemberdayaan UMKM. Penelitian Ortina Rezki (2014) di Mojokerto juga menegaskan bahwa pemberdayaan melalui permodalan, pelatihan, pemasaran, dan sarana prasarana mampu menjadikan UMKM tangguh dan berdaya saing tinggi. Tanpa sinergi antara upaya individu pengrajin dan intervensi kebijakan pemerintah yang terencana, maka potensi pertumbuhan yang sesungguhnya dimiliki oleh industri kerajinan noken di Kabupaten Manokwari akan sulit terealisasi secara optimal, dan peningkatan pendapatan yang berkelanjutan pun hanya akan menjadi harapan tanpa kepastian, sebuah kondisi yang jika dibiarkan akan memperkuat prediksi Dekme Dedi (2016) bahwa kerajinan noken terancam punah karena minimnya regenerasi dan kurangnya dukungan sistematis bagi para pengrajin yang sebagian besar adalah perempuan lanjut usia.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil perhitungan total biaya produksi, total penerimaan, dan pendapatan bersih, diketahui bahwa rata-rata pendapatan pengrajin noken di Kabupaten Manokwari untuk sekali periode produksi mencapai Rp4.617.308, dengan pendapatan bersih setelah dikurangi total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp547.963 menjadi Rp4.070.769. Besarnya pendapatan ini ditentukan oleh dua faktor utama yaitu volume produksi dan harga jual, di mana semakin tinggi hasil produksi dan harga jual maka semakin besar pula penerimaan yang diperoleh pengrajin.

Rumusan strategi pengembangan industri kerajinan tas noken didasarkan pada analisis matriks internal eksternal dan kombinasi strategi matriks SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa total skor

kekuatan mencapai 2,05, kelemahan 1,87, peluang 1,46, dan ancaman 2,60, yang ketika diplotkan ke dalam diagram kartesius menempatkan posisi usaha pengrajin noken pada kuadran I (agresif/growth oriented strategy), yang berarti mereka memiliki kekuatan internal yang baik sekaligus mampu memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Oleh karena itu, prioritas strategi yang sebaiknya diterapkan adalah strategi SO (Strengths-Opportunities), yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang terlihat melalui tiga indikator utama, yakni permodalan, bahan baku, dan pemasaran, sehingga strategi ini menjadi jembatan yang menghubungkan kondisi aktual pengrajin dengan upaya peningkatan pendapatan yang lebih tinggi.

Strategi SO yang telah dirumuskan tersebut pada akhirnya harus diimplementasikan dengan mempertimbangkan secara cermat kondisi riil yang dihadapi para pengrajin. Penjual tas noken memiliki beberapa kekuatan signifikan yang menjadi modal dasar penerapan strategi SO, antara lain akses mudah ke bahan baku, keterampilan yang tinggi, dan biaya produksi yang rendah, serta dapat memanfaatkan peluang nyata seperti kebijakan pemerintah yang mendukung dan permintaan pasar yang terus meningkat terhadap tas noken. Namun demikian, efektivitas strategi SO akan terhambat jika kelemahan seperti kurangnya pemahaman tentang literasi keuangan dan pemasaran digital tidak segera diatasi, dan ancaman dari persaingan dengan tas modern serta kesulitan mendapatkan bahan baku alami harus diantisipasi agar tidak menggagalkan upaya peningkatan pendapatan. Dengan demikian, ketiga rangkaian temuan ini membentuk sebuah rantai logis yang utuh: pendapatan pengrajin perlu ditingkatkan, strategi SO adalah jalan yang tepat untuk mencapainya, dan keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada kemampuan mengatasi kelemahan serta mengurangi ancaman yang ada secara simultan dan berkelanjutan.

## 2. Saran-Saran

Secara teoritis, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji secara empiris efektivitas strategi SO yang direkomendasikan menggunakan metode eksperimen atau survei longitudinal, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi regenerasi pengrajin noken mengingat dominasi usia di atas 40 tahun. Diperlukan juga pengembangan model diversifikasi produk noken yang memadukan nilai budaya dengan selera pasar modern, studi komparatif tentang dampak kebijakan pemerintah terhadap pendapatan UMKM, serta penelitian tentang peran literasi keuangan dan pemasaran digital terhadap ketahanan usaha di daerah tertinggal, termasuk pengembangan instrumen pengukuran keberdayaan pengrajin perempuan dalam ekonomi kreatif berbasis budaya.

Kemudian secara praktis, untuk pengrajin noken disarankan membuka rekening bank, mengikuti pelatihan literasi keuangan, memanfaatkan media sosial untuk promosi, serta berinovasi dalam desain dan motif noken agar lebih menarik pembeli muda. Pembentukan kelompok usaha bersama atau koperasi juga perlu dilakukan untuk memperkuat posisi tawar dalam pembelian bahan baku dan pemasaran produk. Pemerintah daerah disarankan untuk mempertahankan dan memperluas kebijakan wajib pakai noken, menyediakan pelatihan berkelanjutan dalam literasi keuangan, pemasaran digital, dan desain produk, serta memfasilitasi akses permodalan melalui kredit mikro berbasis kelompok. Penyediaan alat produksi yang lebih modern, tempat berjualan yang strategis, serta promosi noken sebagai produk unggulan daerah melalui pameran nasional dan internasional juga sangat diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 123-130.
- Asti, I. A. (2022). Pemberdayaan perajin noken dalam meningkatkan perekonomian masyarakat oleh Dinas Perindustrian Perdagangan (Studi kasus Koperasi dan UKM di Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua). Tidak dipublikasikan.
- Bahabol. (2014). Promosi warisan budaya tradisional tas noken Papua sebagai warisan budaya dunia (CD). Tidak dipublikasikan.
- Boediono. (2002). *Ekonomi makro*. Yogyakarta: BPFE.
- David, F. R. (1997). *Strategic management*. New Jersey: Prentice Hall.

- Dekme, D. (2016). Pengrajin noken pada Suku Bangsa Amungme di Desa Limau Asri Kecamatan Iwaka Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Tidak dipublikasikan.
- Dewi, W., & Meilani, H. (2023). Peranan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(1).
- IC, K., & Setiawan, A. B. (2012). Analisis pemberdayaan koperasi dan UMKM berbasis akuntansi koperasi dan perencanaan permodalan di Kota Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora*, 3(1).
- Januar, A. (2017). Fungsi, makna, dan eksistensi noken sebagai simbol identitas orang Papua. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*, 35(2).
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar ilmu antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marit, E. L. (2016). Noken dan perempuan: Analisis wacana gender dan ideologi. Tidak dipublikasikan.
- Mega, S. (2019). Analisis strategi pemasaran industri rumah tangga Tas Rajut Tali Kur di Payakumbuh. Tidak dipublikasikan.
- Ortina, R. (2014). Analisis pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah (Studi kasus pada Kota Mojokerto). Diambil dari <file:///Users/marthenesowe/Documents/MY%20DOKUMEN/TS/xxxxx/1110-2180-1-SM.pdf>
- Rio, Chodijah, S., & Yunisvita. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pekerja wanita sebagai ibu rumah tangga. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2).
- Rumetna, M. S., Dkk. (2020). Optimalisasi penjualan noken kulit kayu menggunakan metode simpleks dan software POM-QM. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 8(1).
- Sawir, M., Dkk. (2021). Pemberdayaan local wisdom usaha kerajinan noken Papua berbasis digital di Kelurahan Ardipura Jayapura Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2).
- Sri, M. W., Mappamiring, H., & Parawangi, A. (2022). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro dan menengah (UMKM) di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Diambil dari [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/34094-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/34094-Full_Text.pdf)
- Tumija. (2022). Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada masa pandemi COVID-19 di Cipageran, Cimahi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Zonggonau, Rahayu, S., & Maspaitella, M. (2021). Strategi pengembangan industri kerajinan tas noken (Studi kasus pengrajin lokal Kabupaten Mimika). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2).

## ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA JAYAPURA

Emadame Lasria Hutasoit<sup>1</sup>

Agustina Ester Antoh<sup>2</sup>  
jadenjitmau@gmail.com

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the influence of economic growth and employment opportunities on the poverty rate in Jayapura City. Poverty remains a multidimensional challenge continuously faced by Jayapura City, although this region is known as the center of economic growth in Papua Province. Theoretically, economic growth indicated by an increase in Gross Regional Domestic Product and the expansion of employment opportunities is expected to reduce poverty levels; however, preliminary data shows that the relationship between these three variables is not always linear or consistent. The research method employed a quantitative approach using annual time series data from 2002 to 2024 sourced from the Central Bureau of Statistics of Jayapura City. The analysis was conducted using multiple linear regression with the poverty rate as the dependent variable, while Gross Regional Domestic Product at constant prices as an indicator of economic growth and the employment opportunity rate served as independent variables. Prior to regression, the data were tested for classical assumptions including normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation to ensure model validity. Hypothesis testing was performed using the t-test to examine partial effects and the F-test to examine simultaneous effects. The results show that partially, both economic growth and employment opportunities have a negative and significant influence on the poverty rate in Jayapura City, meaning that any increase in these two variables will be followed by a decrease in the percentage of poor population. Simultaneously, both variables together also have a significant influence on the poverty rate and are able to explain almost all of the variation occurring in the poverty rate, thus confirming that economic growth and employment opportunities are the main determinants in the dynamics of poverty reduction in this region.*

*Keywords: Poverty, GRDP, Employment Opportunities*

### PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang menjadi fokus utama pembangunan ekonomi di berbagai negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Secara teoretis, kemiskinan erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi meningkat, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Indikator utama pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Sementara itu, kesempatan kerja didefinisikan sebagai ketersediaan lapangan pekerjaan yang telah diisi oleh pencari kerja, atau permintaan atas tenaga kerja. Teori modal manusia (Human Capital Theory) yang dikembangkan oleh Schultz dan Becker menekankan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan investasi yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan tenaga kerja. Selain itu, Teori Lingkar Kemiskinan (Vicious Cycle of Poverty) dari Nurkse menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi, sehingga suatu negara atau daerah mengalami kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Dalam konteks ekonomi regional, pusat pertumbuhan seperti Kota Jayapura diharapkan menjadi mesin penggerak yang menyebarkan manfaat pembangunan ke wilayah sekitarnya (spread effect), termasuk melalui penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>2</sup> Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan kemiskinan. Mufidah (2022) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hartati dkk. (2015) dalam studinya di Kabupaten Jayapura mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Rahmianti dkk. (2024) juga mengkonfirmasi hubungan tersebut untuk periode 2017-2022 di Jayapura. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait pengaruh simultan antara PDRB dan tingkat kesempatan kerja terhadap kemiskinan dengan periode pengamatan yang lebih panjang, yaitu 2002 hingga 2024, yang menjadi celah penting untuk dikaji lebih lanjut.

Kota Jayapura sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua menunjukkan tren pertumbuhan PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tidak selalu menurun secara linear. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa meskipun PDRB naik, pada tahun 2005 hingga 2007 tingkat kemiskinan justru meningkat, mencapai puncak 25,69 persen pada tahun 2006. Setelah tahun 2014, penurunan kemiskinan cenderung stagnan di kisaran 10 hingga 12 persen, meskipun PDRB terus bertumbuh. Fluktuasi juga terjadi pada tingkat kesempatan kerja yang bergerak antara 80 hingga 92 persen, dengan penurunan menjadi 85,57 persen pada tahun 2024. Fenomena ini mengindikasikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan kemiskinan tidak bersifat otomatis dan mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti distribusi pendapatan, kualitas pertumbuhan, inflasi, dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan fenomena tersebut, permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kota Jayapura, bagaimana perkembangan tenaga kerja di kota tersebut, serta seberapa besar pengaruh kemiskinan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura. Penelitian ini menjadi menarik karena beberapa alasan. Pertama, Kota Jayapura merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Papua, sehingga dinamika kemiskinan di kota ini menjadi indikator keberhasilan pembangunan regional. Kedua, terdapat ketidaksesuaian antara teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi otomatis menurunkan kemiskinan dengan fakta empiris di lapangan yang menunjukkan stagnasi penurunan kemiskinan pasca tahun 2014. Ketiga, periode penelitian yang panjang dari 2002 hingga 2024 memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tren jangka panjang. Keempat, penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh parsial tetapi juga simultan antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terhadap kemiskinan, sehingga memberikan implikasi kebijakan yang lebih terpadu. Kelima, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Jayapura dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis bukti empiris.

## **METODE PENELITIAN**

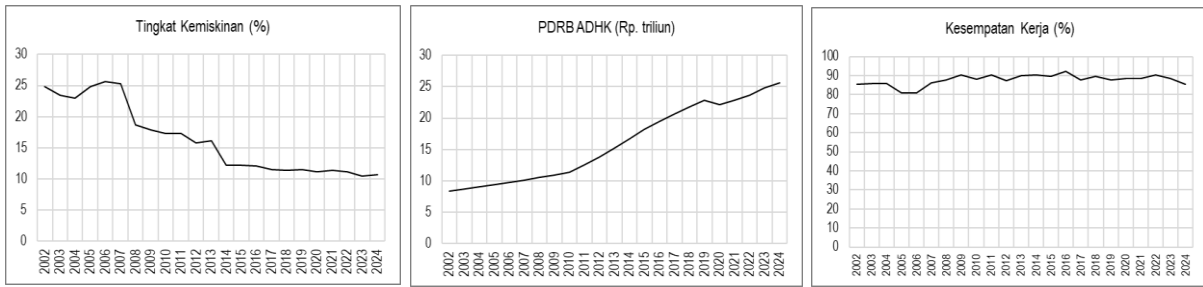
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-analitik dengan data time series tahunan periode 2002–2024 yang bersumber dari data sekunder Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terikat, dengan variabel terikat berupa Tingkat Kemiskinan (MSK) serta variabel bebas berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Kesempatan Kerja (KSK). Metode analisis yang diterapkan adalah regresi linier berganda dengan model  $MSK = a_0 + a_1KSK + a_2PDRB$ . Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, dilakukan uji t, sedangkan untuk menguji pengaruh secara simultan digunakan uji F.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (2025), perkembangan tingkat kemiskinan (MSK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat kesempatan kerja (KSK) di Kota Jayapura selama periode 2002–2024 disajikan pada tiga gambar berikut ini.

**Gambar 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan, PDRB dan Kesempatan Kerja Di Kota Jayapura Tahun 2002-2024**



Sumber : BPS Provinsi Papua, diolah (2024)

Gambar 1 di atas menunjukkan dinamika tiga variabel utama selama 23 tahun pengamatan. Secara umum, tingkat kemiskinan di Kota Jayapura menunjukkan tren penurunan jangka panjang dari 24,83% pada tahun 2002 menjadi 10,72% pada tahun 2024, yang berarti terjadi penurunan sebesar lebih dari separuh dalam dua dekade. Namun, penurunan ini tidak terjadi secara linear. Terdapat periode kritis pada tahun 2005–2007 di mana tingkat kemiskinan justru meningkat dari 22,98% (2004) menjadi puncaknya 25,69% pada tahun 2006, kemungkinan dipengaruhi oleh gejolak ekonomi makro nasional seperti kenaikan harga bahan bakar minyak. Setelah tahun 2007, terjadi perbaikan signifikan hingga tahun 2014, di mana kemiskinan turun drastis menjadi 12,21%. Namun, pasca-2014 hingga 2024, tingkat kemiskinan cenderung stagnan di kisaran 10–12%, mengindikasikan adanya kemiskinan struktural yang lebih resisten terhadap kebijakan konvensional.

Sementara itu, PDRB Kota Jayapura menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari 8,40 triliun rupiah (2002) menjadi 25,66 triliun rupiah (2024), dengan sedikit koreksi pada tahun 2020 (22,12 triliun rupiah) akibat pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa secara agregat, ekonomi Kota Jayapura terus berkembang. Adapun tingkat kesempatan kerja cenderung berfluktuasi dalam rentang 80–92%, dengan nilai tertinggi 92,45% pada tahun 2016 dan terendah 80,95% pada tahun 2006. Penurunan KSK menjadi 85,57% pada tahun 2024 menjadi sinyal peringatan adanya tekanan struktural di pasar kerja.

## 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji pengaruh PDRB dan tingkat kesempatan kerja (KSK) terhadap tingkat kemiskinan (MSK) di Kota Jayapura periode 2002–2024. Namun selazimnya, sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu disampaikan korelasi antar variabel pengamatan sebagai berikut.

**Tabel 2. Analisis Korelasi**

Statistik Korelasi	Nilai
Multiple R	0,9652
R Square	0,9316
Adjusted R Square	0,9248
Standard Error	1,5321
Observasi	23

Sumber : data diolah (2024)

Nilai Multiple R sebesar 0,9652 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas (PDRB dan KSK) dengan variabel terikat (tingkat kemiskinan) sangat kuat dan bersifat negatif, karena koefisien regresi keduanya bertanda negatif. Nilai R Square atau koefisien determinasi sebesar 0,9316 memiliki makna bahwa variasi dari variabel PDRB dan KSK secara bersama-sama mampu menjelaskan sekitar 93,16% dari total variasi yang terjadi pada tingkat kemiskinan di Kota Jayapura. Hanya sekitar 6,84% variasi kemiskinan yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti inflasi, distribusi

pendapatan, tingkat pendidikan, atau program bantuan sosial langsung. Adjusted R Square sebesar 0,9248, yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel dan observasi, tetap berada pada level yang sangat tinggi. Hal ini mengonfirmasi bahwa tingginya nilai R Square bukanlah hasil artifak dari banyaknya variabel, tetapi benar-benar merefleksikan kekuatan penjelas model. Standard Error sebesar 1,5321 merepresentasikan rata-rata deviasi antara nilai kemiskinan yang diprediksi oleh model dengan nilai kemiskinan yang sesungguhnya. Dengan kisaran tingkat kemiskinan aktual antara 10,50% hingga 25,69%, kesalahan prediksi rata-rata sekitar 1,53 persen dapat dianggap cukup rendah, yang semakin memperkuat keakuratan model.

Kekuatan model juga di uji secara simultan menggunakan ANOVA, dengan hasilnya disajikan pada Tabel 3. Terlihat bahwa nilai F-statistic sebesar 136,19 dengan tingkat signifikansi (p-value) 0,0000. Nilai signifikansi yang jauh di bawah batas kritis  $\alpha = 0,05$  memberikan bukti statistik yang sangat kuat untuk menolak  $H_0$  yang menyatakan tidak ada pengaruh simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan (bersama-sama), variabel PDRB dan tingkat kesempatan kerja (KSK) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jayapura. Model regresi yang digunakan dinyatakan valid dan layak untuk melakukan prediksi atau penjelasan.

**Tabel 3. Hasil Uji ANOVA (Analysis of Variance)**

Sumber Variasi	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	2	639,33	319,66	136,19	0,0000
Residual	20	46,95	2,35		
Total	22	686,27			

Sumber : data diolah (2024)

Dengan terujinya model sangat signifikan dan layak digunakan, maka tahap terakhir adalah melakukan analisis regresi berganda, dengan hasilnya sebagai berikut.

**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Regresi**

Variabel	Koefisien	Standard Error	t-stat	p-value
Intercept (Konstanta)	87,2230	10,9399	7,9729	0,0000
PDRB	-0,7100	0,0598	-11,8749	0,0000
KSK	-0,6783	0,1290	-5,2601	0,0000
Dependent variable: Tingkat Kemiskinan (MSK)				

Sumber : data diolah (2024)

Berdasarkan hasil perhitungan statistik regresi, seperti yang dipaparkan pada Tabel 4 di atas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$MSK = 87,2230 - 0,7100 \cdot PDRB - 0,6783 \cdot KSK$$

Persamaan ini merupakan persamaan linier berganda yang terdiri atas 4 variabel, yaitu MSK (Tingkat Kemiskinan) yang merupakan dependent variable, serta PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan KSK (Tingkat Kesempatan Kerja) sebagai variabel-variabel independent. Setiap koefisien pada persamaan ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

- Nilai konstanta sebesar 87,2230 memiliki makna bahwa jika PDRB dan KSK bernilai nol, maka tingkat kemiskinan teoritis akan berada pada posisi 87,22 persen, yang mencerminkan kondisi tanpa adanya aktivitas ekonomi dan lapangan kerja.
- Koefisien PDRB sebesar -0,7100 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar satu triliun rupiah akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,71 persen, dengan asumsi variabel kesempatan kerja tetap konstan (ceteris paribus).

- Koefisien KSK sebesar -0,6783 menyatakan bahwa setiap peningkatan satu persen dalam tingkat kesempatan kerja akan berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,68 persen, dengan asumsi PDRB tidak berubah. Tanda negatif pada kedua koefisien tersebut selaras dengan teori ekonomi klasik dan pembangunan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja merupakan motor utama dalam pengentasan kemiskinan.

Hasil uji t yang terlihat pada Tabel 4 digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial (individual). Nilai t-stat untuk PDRB adalah -11,8749 dengan p-value 0,0000, sedangkan untuk KSK adalah -5,2601 dengan p-value 0,0000. Kriteria pengujian menyatakan bahwa jika p-value < 0,05, maka  $H_0$  ditolak (berarti berpengaruh signifikan). Karena p-value kedua variabel jauh di bawah 0,05, maka secara parsial, baik PDRB maupun KSK memiliki pengaruh negatif yang sangat signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Probabilitas bahwa hubungan yang diamati terjadi secara kebetulan atau acak adalah hampir nol. Perlu dicatat bahwa koefisien absolut PDRB (0,7100) sedikit lebih besar dibandingkan KSK (0,6783), yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang sedikit lebih dominan dibandingkan kesempatan kerja dalam menurunkan kemiskinan di Kota Jayapura. Namun, perbedaan yang tidak terlalu besar ini juga menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki peran yang hampir setara dan bersifat komplementer.

## 2. Pembahasan

Hasil analisis kuantitatif dalam penelitian ini mengonfirmasi adanya hubungan negatif dan signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan di Kota Jayapura. Berdasarkan hasil regresi linier berganda yang telah dilakukan, diperoleh koefisien PDRB sebesar -0,7100 dengan nilai p-value 0,0000, yang berarti setiap peningkatan PDRB sebesar satu triliun rupiah akan mengurangi persentase penduduk miskin sebesar 0,71 poin persen, dengan asumsi variabel kesempatan kerja dianggap tetap. Temuan empiris ini sejalan dengan postulat teori ekonomi pembangunan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif berfungsi sebagai mesin pengurang kemiskinan melalui dua jalur utama, yaitu peningkatan pendapatan riil masyarakat dan perluasan kesempatan kerja yang lebih luas seiring dengan berkembangnya sektor-sektor produktif. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Saerang dkk (2021) di Kabupaten Minahasa yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Penelitian lain oleh Balqis dkk (2024) juga membuktikan adanya hubungan dua arah yang negatif antara pertumbuhan ekonomi sektor manufaktur dan kemiskinan, di mana pertumbuhan ekonomi merespons negatif terhadap kemiskinan dan sebaliknya, hingga keduanya mencapai titik keseimbangan.

Namun, ketika hasil regresi ini dikaitkan dengan dinamika data aktual, ditemukan suatu kompleksitas yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Data menunjukkan bahwa meskipun PDRB terus mencatatkan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun, laju penurunan kemiskinan setelah periode 2014 cenderung mengalami stagnasi atau melambat secara nyata. Tingkat kemiskinan pada tahun 2014 tercatat sebesar 12,21 persen, dan sepuluh tahun kemudian pada tahun 2024 masih berada di angka 10,72 persen, hanya turun sekitar 1,5 poin persen dalam satu dekade. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura, sebagaimana temuan Zulfia (2024) di Jawa Timur, belum sepenuhnya inklusif. Penelitian Zulfia yang menganalisis pertumbuhan ekonomi inklusif di kabupaten dan kota Jawa Timur tahun 2018-2022 menjelaskan bahwa pada tingkat kabupaten dan kota, beberapa daerah masih mengalami ketimpangan distribusi pendapatan, dan berdasarkan Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR), Provinsi Jawa Timur masih belum inklusif dalam hal penurunan kemiskinan dan pengangguran. Temuan ini relevan dengan kondisi Kota Jayapura di mana stagnasi penurunan kemiskinan mengindikasikan adanya dilema pertumbuhan ekonomi, yaitu manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah dan rentan. Kondisi stagnasi ini dapat dipicu oleh beberapa faktor struktural seperti tingginya ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di sektor-sektor padat modal dengan daya serap tenaga kerja rendah, ketidaksesuaian antara kualifikasi angkatan kerja yang tersedia dengan kebutuhan industri, serta program-program penanggulangan kemiskinan yang kurang tepat sasaran. Hasil penelitian Yunita (2025) yang mengkaji peran sektoral terhadap kemiskinan di Indonesia selama periode COVID-19 menemukan bahwa sektor jasa menunjukkan pengaruh terbesar terhadap kemiskinan dan ketimpangan

pada periode sebelum pandemi, sementara sektor industri cenderung meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pada masa pandemi; sebaliknya, sektor pertanian justru berperan penting dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan selama COVID-19. Implikasi kebijakan yang muncul dari temuan ini menuntut pergeseran paradigma pembangunan, di mana pemerintah daerah tidak boleh lagi hanya berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi agregat semata, tetapi harus secara simultan mengarahkan kebijakan untuk memastikan distribusi manfaat yang lebih adil melalui penguatan program perlindungan sosial, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan UMKM, serta reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif.

Analisis empiris terhadap perkembangan tenaga kerja di Kota Jayapura selama periode 2002 hingga 2024 mengungkapkan bahwa tingkat kesempatan kerja (KSK) berfluktuasi dalam rentang yang relatif tinggi, yaitu antara 80 hingga 92 persen, yang mencerminkan ketahanan pasar kerja lokal meskipun dihadapkan pada dinamika ekonomi yang terus berubah. Hasil regresi dalam penelitian ini memperkuat posisi tingkat kesempatan kerja sebagai variabel kunci dalam pengentasan kemiskinan, dengan koefisien regresi sebesar -0,6783 dan nilai p-value 0,0000, yang berarti setiap peningkatan KSK sebesar satu persen akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,68 persen. Temuan ini memberikan bukti kuat bahwa perluasan akses terhadap lapangan kerja secara langsung meningkatkan kapasitas pendapatan rumah tangga miskin dan mengurangi kerentanan ekonomi mereka. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Iksan dan Arka (2022) di Provinsi Jawa Barat Bagian Selatan yang menunjukkan bahwa upah dan kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya semakin tinggi upah yang diterima dan semakin luas kesempatan kerja yang tersedia, maka tingkat kemiskinan akan semakin rendah. Penelitian Saerang dkk. (2021) juga mengonfirmasi bahwa kesempatan kerja berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa. Lebih lanjut, Prasetyo dan Rivai (2025) dalam studinya di enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2012-2024 menemukan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB, yang secara tidak langsung berkontribusi pada penurunan kemiskinan.

Namun, tren tingkat kesempatan kerja yang stabil pada angka tinggi perlu dibaca dengan hati-hati karena angka agregat yang tinggi dapat menyembunyikan ketidaksetaraan dalam kualitas pekerjaan, sebaran geografis, atau akses bagi kelompok tertentu. Kekhawatiran ini makin mengemuka menyusul penurunan KSK pada tahun 2024 menjadi 85,57 persen, yang merupakan angka terendah kedua setelah tahun 2006, menjadi sinyal peringatan akan adanya tekanan struktural di pasar kerja Kota Jayapura. Penurunan tersebut mungkin tidak hanya dipicu oleh dampak sisa pandemi COVID-19, tetapi juga oleh transformasi ekonomi yang bergerak ke arah sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan lebih spesifik, sementara penawaran tenaga kerja belum sepenuhnya beradaptasi. Hal ini sejalan dengan temuan Hasibuan dkk. (2025) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara signifikan memediasi pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun IPM tidak secara signifikan memediasi hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa hubungan antara ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi bersifat lebih kompleks dan memerlukan intervensi kebijakan langsung. Oleh karena itu, strategi penurunan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan peningkatan kuantitas kesempatan kerja, melainkan harus menjawab tantangan kualitas dan kecocokan keterampilan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pekerjaan yang tersedia adalah pekerjaan yang layak, dengan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, dilengkapi dengan jaminan sosial dan kondisi kerja yang manusiawi. Tanpa perhatian pada kualitas pekerjaan, peningkatan KSK bisa saja hanya mencerminkan bertambahnya pekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang tidak menentu, yang dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan menjadi terbatas.

Model regresi yang dibangun dalam penelitian ini mengungkap kekuatan penjelas yang sangat tinggi. Nilai R Square sebesar 0,9316 atau 93,16 persen mengindikasikan bahwa variabel PDRB dan tingkat kesempatan kerja secara bersama-sama mampu menerangkan hampir keseluruhan variasi dari tingkat kemiskinan di Kota Jayapura, yang berarti hanya sekitar 6,84 persen variasi kemiskinan yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model seperti inflasi, tingkat pendidikan, akses kesehatan, distribusi pendapatan, program bantuan sosial, dan faktor geografis. Nilai R-square yang mendekati sempurna ini menegaskan bahwa kedua faktor tersebut merupakan pilar utama dan determinan paling krusial dalam dinamika pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut. Sulaeman dkk (2024) dalam penelitiannya tentang dinamika kemiskinan, pengangguran, dan anggaran kesehatan di Indonesia

menyimpulkan bahwa meskipun investasi dalam anggaran kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dengan meningkatkan modal manusia, kemiskinan dan pengangguran secara negatif berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Demikian pula, Prasetyo dan Rivai (2025) menemukan bahwa Poverty Gap Index (PGI) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan PDRB, yang menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan (bukan hanya jumlah penduduk miskin) merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja ekonomi regional.

Jika dibandingkan antara kedua variabel bebas, PDRB memegang pengaruh yang sedikit lebih dominan dengan nilai koefisien absolut sebesar 0,7100 dibandingkan tingkat kesempatan kerja dengan koefisien absolut sebesar 0,6783. Selisih yang tidak terlalu besar ini mengisyaratkan bahwa skala dan momentum pertumbuhan ekonomi secara agregat masih menjadi penggerak utama penurunan kemiskinan, namun perluasan kesempatan kerja memiliki peran yang hampir setara dan bersifat komplementer. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh penyerapan tenaga kerja yang memadai akan memiliki dampak pengurangan kemiskinan yang terbatas, demikian pula sebaliknya. Hasil yang sedikit berbeda ditemukan oleh Wambemu dkk (2022) di Kabupaten Merauke, Papua, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan juga tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Perbedaan hasil ini dapat dijelaskan oleh karakteristik masing-masing daerah, di mana Kota Jayapura sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Papua memiliki dinamika ekonomi yang berbeda dengan Kabupaten Merauke yang merupakan kabupaten terluas dengan karakteristik agraris dan letak geografis yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan bersifat sangat kontekstual dan bergantung pada struktur ekonomi, kualitas kelembagaan, serta efektivitas kebijakan distribusi di masing-masing daerah.

Di balik kekuatan penjelas model yang tinggi, ruang sebesar 6,84 persen yang ditentukan oleh faktor-faktor di luar model justru sangat kritis karena mengingatkan bahwa kemiskinan pada hakikatnya adalah fenomena multidimensi yang kompleks. Faktor-faktor seperti kebijakan fiskal dan sosial, tingkat inflasi harga pangan, status kesehatan masyarakat, ketimpangan gender, serta laju pertumbuhan penduduk sangat mungkin berpengaruh terhadap dinamika kemiskinan di Kota Jayapura. Penelitian Zulfia (2024) menambahkan bahwa faktor infrastruktur ekonomi, infrastruktur dasar, kemiskinan, dan keuangan inklusif terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap indeks pertumbuhan inklusif, sehingga diperlukan perhatian khusus pada faktor-faktor tersebut agar pertumbuhan ekonomi dapat berdampak lebih luas terhadap pengurangan kemiskinan. Temuan ini secara tegas menggarisbawahi bahwa strategi pengentasan kemiskinan ke depan harus bersifat komprehensif dan integratif, tidak boleh terjebak pada pendekatan tunggal yang hanya mengandalkan percepatan pertumbuhan PDRB atau sekadar mengejar angka partisipasi kerja secara kuantitatif. Pendekatan tiga lapis yang sinergis menjadi suatu keharusan, meliputi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, padat karya, dan inklusif; memperkuat pasar kerja melalui peningkatan keterampilan dan perlindungan pekerja; serta secara aktif mengintervensi faktor-faktor non-ekonomi melalui program pembangunan modal manusia, perluasan jaring pengaman sosial, dan pengendalian inflasi harga kebutuhan pokok. Dengan menerapkan kerangka kebijakan multidimensi yang terpadu ini, diharapkan Kota Jayapura tidak hanya dapat keluar dari jebakan stagnasi penurunan kemiskinan yang terjadi dalam satu dekade terakhir, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh warganya. Penurunan kemiskinan tidak cukup hanya dilihat dari angka persentase yang terus mengecil, tetapi harus diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin secara menyeluruh, sehingga mereka benar-benar terbebas dari kerentanan untuk jatuh miskin kembali di masa depan.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan terhadap data tingkat kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat kesempatan kerja (KSK) di Kota Jayapura selama periode 2002 hingga 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial, variabel PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Maknanya, setiap peningkatan PDRB akan diikuti oleh penurunan

persentase penduduk miskin di kota tersebut, yang mengonfirmasi teori ekonomi pembangunan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berfungsi sebagai mesin pengurang kemiskinan melalui peningkatan pendapatan riil masyarakat dan perluasan sektor-sektor produktif. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan telah diterima secara statistik.

Tidak hanya itu, secara parsial variabel tingkat kesempatan kerja (KSK) juga terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jayapura, yang berarti setiap peningkatan kesempatan kerja berkontribusi langsung pada penurunan tingkat kemiskinan karena perluasan akses terhadap lapangan kerja meningkatkan kapasitas pendapatan rumah tangga miskin dan mengurangi kerentanan ekonomi mereka. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa kesempatan kerja berpengaruh negatif terhadap kemiskinan juga diterima. Apabila dibandingkan antara kedua variabel tersebut, PDRB memiliki pengaruh yang sedikit lebih dominan dibandingkan kesempatan kerja, namun perbedaannya tidak terlalu besar sehingga mengindikasikan bahwa kedua variabel memiliki peran yang hampir setara dan bersifat saling melengkapi satu sama lain dalam upaya penurunan kemiskinan.

Lebih lanjut, secara simultan atau bersama-sama, variabel PDRB dan tingkat kesempatan kerja terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jayapura, di mana kedua variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan hampir seluruh variasi yang terjadi pada tingkat kemiskinan. Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja merupakan determinan utama dan paling krusial dalam dinamika pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan yang paling efektif adalah strategi yang mengombinasikan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas dengan upaya memperluas kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan, karena kedua faktor ini harus berjalan secara sinergis dan saling memperkuat untuk mencapai hasil yang optimal dalam menekan angka kemiskinan di Kota Jayapura.

## 2. Saran-Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa masih terdapat variasi kemiskinan yang dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model, maka untuk peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan variabel dengan memasukkan faktor-faktor lain seperti tingkat inflasi, indeks pembangunan manusia, ketimpangan distribusi pendapatan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan, serta akses terhadap infrastruktur dasar, di samping menggunakan pendekatan ekonometrika yang lebih kompleks seperti regresi data panel atau analisis jalur untuk menguji mekanisme transmisi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan melalui kesempatan kerja.

Pemerintah Kota Jayapura disarankan untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi agar lebih inklusif dan berkualitas dengan mendorong diversifikasi sektor ekonomi padat karya seperti pertanian terpadu perkotaan, UMKM berbasis lokal, dan pariwisata berbasis komunitas, sekaligus memperluas kesempatan kerja yang layak melalui program pelatihan vokasi, sertifikasi keahlian, penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan daerah, serta penguatan perlindungan pekerja berupa upah layak, jaminan sosial, dan pengurangan kesenjangan gender. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dengan memutakhirkan basis data terpadu secara berkala, mengombinasikan bantuan tunai dengan program pemberdayaan ekonomi produktif seperti pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan lunak, serta meningkatkan investasi jangka panjang pada pendidikan dan kesehatan melalui perluasan akses pendidikan, program beasiswa, peningkatan layanan kesehatan, serta program gizi masyarakat untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Balqis, R., Syahnur, S., & Ernawati, E. 2024. Analysis of the Influence of Investment and Labor on Poverty Levels Through the Growth of the Indonesian Manufacturing Industry. *Ekonomikalia Journal of Economics*, 1, 29-37.

- Hartati, E., Riani, I. A. P., & Bisai, C. M. (2015). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 2(1), 61-71.
- Hasibuan, A., dkk. (2025). Path Analysis of HDI Mediating Poverty and Unemployment Effects on Economic Growth in Indonesia. *Balance Jurnal Ekonomi*, 21(1), 85-95.
- Iksan, M., & Arka, S. (2022). Pengaruh Upah, Pendidikan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja Serta Kemiskinan Provinsi Jabar Bagian Selatan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(1), 147-175.
- Mufidah, R. (2022). Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. *Jurnal Education and development*, 10(2), 521-527
- Pasalbessy, V. F. (2019). Pengaruh Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 84-98.
- Prasetyo, M. D., & Rivai, A. (2025). Regional Economic Growth Drivers in Java: Poverty, Human Development, and Labor : An Empirical Study Using Panel Data from 2012 to 2024. *Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 88–106.
- Rahmianti, S., Siompo, N., Yeubun, S. F., & Affandy, F. F. (2024). Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jayapura Pada Tahun 2017-2022. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 16(2), 238-243.
- Saerang, J. C. J., Kumenaung, A. G., & Tolosang, K. D. (2021). Pengaruh Belanja Modal Dan Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Intervening Variabel Di Kabupaten Minahasa Tahun 2005-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(05), 40-51.
- Sukirno, S. (2000). Pengantar teori : makroekonomi. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sulaeman, M., Suharno, S., & Ahmad, A. A. (2024). Economic Growth in Indonesia: Dynamics of Poverty, Unemployment, and Health Budgets. *Agregat : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 179-198.
- Wambemu, K. T., Rotinsulu, T. O., & Naukoko, A. T. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Merauke. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(7), 1-12.
- Yunita, M. (2025). Assessing the Role of Sector Growth on Poverty and Inequality In Indonesia. *Ekonomika*, 20(1), 52-58.
- Zulfia, B. (2024). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Serta Determinannya (Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Jawa Timur). Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

## ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN MELALUI KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KABUPATEN NABIRE

**Irwan Dwi Saputra**<sup>1</sup>

*irwnsaputra316@gmail.com*

**Agustina Sanggrangbano**<sup>2</sup>

*inasanggrangbano@gmail.com*

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of economic growth on poverty in Nabire Regency with the quality of human development measured by the Human Development Index (HDI) as an intervening variable. Using a quantitative approach with secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS) for the period 2010 to 2023, the analytical methods employed are multiple regression analysis, path analysis, and the Sobel test to examine the significance of HDI's mediating role. The results show that GRP has a positive and significant effect on HDI (0.967), GRP has a negative and significant direct effect on poverty (-0.853), and HDI has a negative and significant effect on poverty (-0.783). The Sobel test proves that HDI acts as a significant intervening variable with a test statistic value of -4.133 and a p-value of 0.000. The indirect effect of GRP on poverty through HDI reaches -0.757, making the total effect of GRP on poverty -1.610. This means that nearly half (approximately 47 percent) of the total effect of economic growth on poverty reduction is channeled through improvements in the quality of human development.*

*Keywords: Economic Growth, Poverty, Quality of Human Development, Path Analysis*

### PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan finansial, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta lapangan kerja. Oleh karena itu, memahami akar permasalahan kemiskinan memerlukan landasan teoretis yang kuat. Secara teoretis, teori pertumbuhan ekonomi Solow (1956) menyatakan bahwa peningkatan modal, tenaga kerja, dan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, teori kemiskinan Arthur Lewis, yang sering dikenal dengan Model Dua Sektor (Lewis Dual-Sector Model), merupakan salah satu pilar dalam ekonomi pembangunan. Lewis (1954) memandang kemiskinan bukan sekadar masalah kekurangan uang, melainkan hasil dari struktur ekonomi yang tidak seimbang antara sektor tradisional dan modern. Melengkapi kedua pandangan tersebut, Sen (1999) dalam teori pembangunan manusia menambahkan bahwa kesejahteraan sejati harus diukur dari kapabilitas individu, yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Dari ketiga kerangka teoretis ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting yang merefleksikan kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dengan demikian, secara konseptual, hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, dan kemiskinan bersifat dinamis dan saling terkait.

Sejalan dengan kerangka teoretis tersebut, berbagai penelitian empiris telah dilakukan untuk menguji hubungan antara pertumbuhan ekonomi, IPM, pengangguran, dan kemiskinan, meskipun hasilnya menunjukkan variasi yang cukup besar antar wilayah. Misalnya, Angelia, Hasugian, & Suharianto (2025) di Provinsi Sumatera Utara menemukan bahwa secara parsial hanya PDRB yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara pengangguran dan IPM tidak

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>2</sup> Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

menunjukkan pengaruh signifikan, namun secara simultan ketiganya berkontribusi sebesar 83,63 persen. Berbeda dengan temuan tersebut, Susanti (2013) di Jawa Barat justru menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti semakin tinggi PDRB justru meningkatkan kemiskinan, sementara IPM berpengaruh negatif dan signifikan. Temuan yang kontradiktif ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan, melainkan sangat tergantung pada konteks lokal dan distribusi hasil pembangunan.

Lebih lanjut, Amar & Arkum (2024) di Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa PDRB dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan karena para penganggur umumnya bukan berasal dari kalangan miskin melainkan sedang mencari pekerjaan yang lebih sesuai. Sementara itu, Andykha, Handayani, & Woyanti (2018) di Provinsi Jawa Tengah memperkuat temuan bahwa laju pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata dan cenderung didominasi golongan berpendapatan tinggi, sementara IPM berpengaruh negatif dan signifikan. Nasrulloh (2025) di Kabupaten Sampang menemukan bahwa PDRB berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan IPM berpengaruh negatif dan signifikan sebagai faktor yang lebih dominan. Hasil-hasil ini semakin memperkuat dugaan bahwa IPM sering kali memainkan peran yang lebih langsung dalam menurunkan kemiskinan dibandingkan pertumbuhan ekonomi semata.

Hal tersebut juga terbukti dalam penelitian Widyantoro & Agustin (2025) di 34 provinsi Indonesia periode 2019-2023 dengan pendekatan Random Effect Model, yang hanya menemukan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara PDRB, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia memainkan peran yang lebih vital dibandingkan pertumbuhan ekonomi atau kebijakan upah saja. Namun demikian, hasil yang berbeda justru ditemukan oleh Purnama dkk. (2025) di Provinsi Lampung, yang menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara pendidikan dan pengangguran berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Sayifullah & Gandasari (2016) di Provinsi Banten juga menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan tingkat pengangguran tidak signifikan karena sebagian penganggur bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang masih memadai.

Penelitian Ilmi (2021) di lima provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia (Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan, sementara PDRB dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan. Sari (2024) di Jawa Timur dengan perspektif ekonomi Islam menemukan bahwa PDRB dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan IPM berpengaruh negatif dan signifikan sebagai variabel paling berpengaruh. Terakhir, Roseline (2023) di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa PDRB per kapita dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan, sementara tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Secara keseluruhan, beragamnya hasil studi empiris tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi, IPM, pengangguran, dan kemiskinan sangat bergantung pada karakteristik wilayah, periode waktu, metode analisis, serta konteks sosial-ekonomi setempat. Oleh karena itu, generalisasi hasil dari satu wilayah ke wilayah lain perlu dilakukan dengan hati-hati, dan penelitian lebih lanjut pada wilayah spesifik seperti Kabupaten Nabire menjadi sangat relevan.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Nabire menjadi sangat menarik dan relevan untuk dikaji lebih mendalam mengingat kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan yang cukup mencolok. Meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nabire menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari Rp4,09 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp8,15 triliun pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di daerah ini masih tergolong tinggi, yakni hanya turun dari 33,68 persen menjadi 23,35 persen dalam periode yang sama. Di sisi lain, IPM memang mengalami peningkatan dari 64,49 menjadi 70,84, namun angkanya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. Kondisi ini secara nyata mengindikasikan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai peran IPM sebagai variabel yang memediasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dengan kata lain, apakah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nabire telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas

pembangunan manusia, dan selanjutnya apakah peningkatan IPM tersebut benar-benar berdampak pada penurunan kemiskinan, menjadi pertanyaan kunci yang perlu dijawab.

Berdasarkan latar belakang teoretis yang menekankan pentingnya kapabilitas individu, temuan-temuan empiris yang beragam dan saling melengkapi, serta fenomena ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di Kabupaten Nabire, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan melalui variabel intervening kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Nabire. Pertanyaan ini menjadi sentral karena menjawab tidak sekadar apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan, tetapi lebih jauh bagaimana mekanisme pengaruh tersebut bekerja melalui peningkatan kapabilitas masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi menarik untuk diangkat karena secara nyata menunjukkan kompleksitas hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Nabire. Di tengah peningkatan PDRB yang signifikan, tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan IPM yang relatif rendah memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan tanpa disertai peningkatan kualitas pembangunan manusia. Dengan menjadikan kualitas pembangunan manusia sebagai variabel intervening, penelitian ini mampu menjawab kesenjangan antara harapan teori dan realitas di lapangan.

**METODE PENELITIAN**

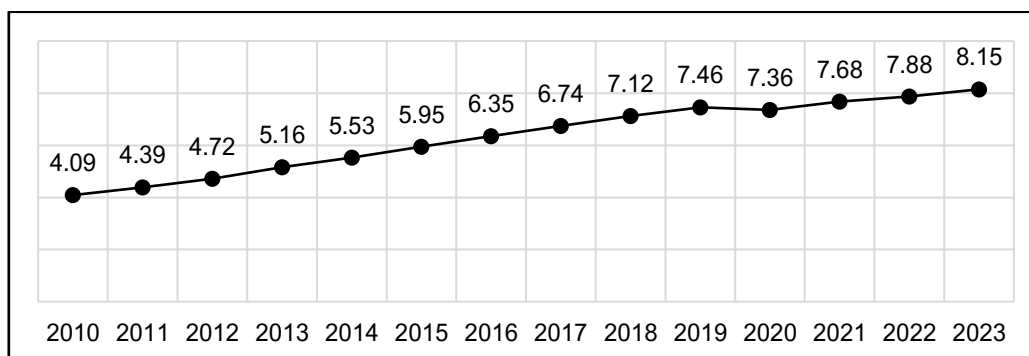
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan ruang lingkup di Kabupaten Nabire, menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2010 hingga 2023 yang mencakup tiga indikator utama, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat kemiskinan. Teknik pengambilan data dilakukan melalui analisis dokumen dan laporan resmi, dilanjutkan dengan verifikasi data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan analisis jalur (path analysis) yang diterapkan dalam dua tahap, yaitu regresi PDRB terhadap IPM dan regresi IPM terhadap tingkat kemiskinan. Untuk menguji signifikansi peran IPM sebagai variabel mediasi, penelitian ini menggunakan uji Sobel (Sobel test) yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh tidak langsung PDRB terhadap kemiskinan melalui IPM signifikan secara statistik.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1. Deskripsi Variabel Penelitian**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai hasil analisis pengaruh antar variabel, penting untuk memahami terlebih dahulu gambaran umum perkembangan masing-masing variabel selama periode penelitian, yaitu dari tahun 2010 hingga 2023. Ketiga variabel utama dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kualitas pembangunan manusia, dan tingkat kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nabire.

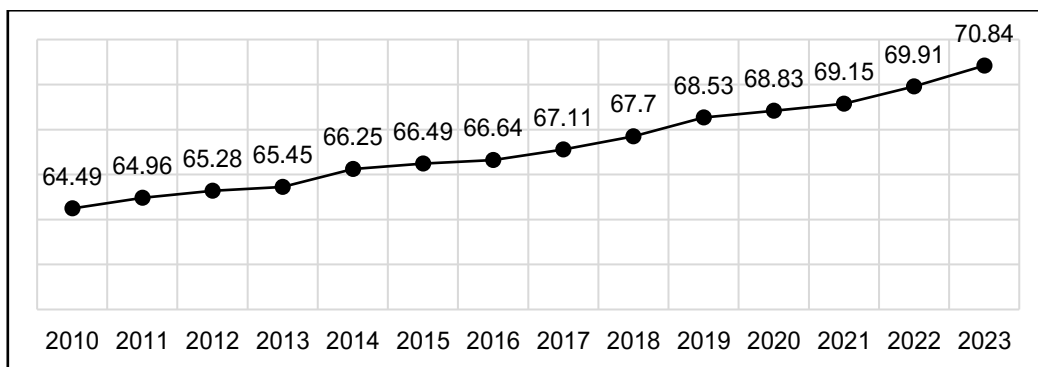
**Gambar 1. Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Nabire Tahun 2010-2023 (triliun rp)**



Sumber : BPS Kabupaten Nabire, data diolah (2024)

Perkembangan PDRB di Kabupaten Nabire menunjukkan tren yang positif dan konsisten selama periode 2010 hingga 2023. Pada tahun 2010, nilai PDRB tercatat sebesar Rp4,09 triliun, kemudian secara bertahap meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp8,15 triliun pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di daerah tersebut, yaitu sebesar 5,44% per tahun. Secara nominal, PDRB Kabupaten Nabire hampir mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat dalam kurun waktu 14 tahun. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini idealnya menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta menyediakan layanan publik yang lebih baik. Namun, peningkatan PDRB saja belum cukup untuk menggambarkan seberapa besar manfaat ekonomi tersebut dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin.

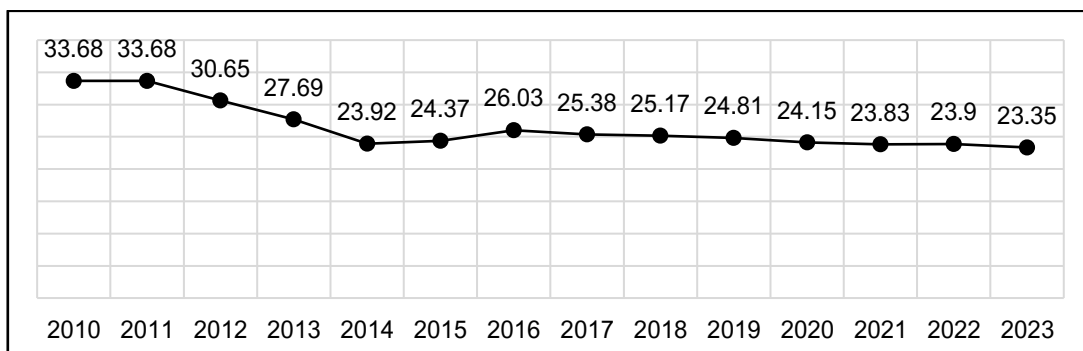
**Gambar 2. Perkembangan IPM Kabupaten Nabire Tahun 2010-2023 (indeks)**



Sumber : BPS Kabupaten Nabire, data diolah (2024)

Sementara itu, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nabire juga menunjukkan tren peningkatan, meskipun dengan laju yang relatif lambat. Pada tahun 2010, IPM berada pada angka 64,49 poin, yang tergolong dalam kategori pembangunan manusia sedang. Selama periode 14 tahun, IPM terus meningkat hingga mencapai 70,84 poin pada tahun 2023, dengan kata lain mengalami kenaikan sekitar 0,73% per tahun. Peningkatan IPM ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, terutama yang tercermin dari tiga dimensi utama penyusunnya, yaitu kesehatan (harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (daya beli masyarakat). Meskipun terjadi peningkatan, capaian IPM Kabupaten Nabire yang masih berada di kisaran 70,84 menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang luas untuk perbaikan, terutama dalam hal akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.

**Gambar 3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Nabire Tahun 2010-2023 (persen)**



Sumber : BPS Kabupaten Nabire, data diolah (2024)

Adapun perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Nabire menunjukkan tren penurunan, namun angka kemiskinan masih tergolong tinggi. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 33,68 persen, artinya hampir sepertiga penduduk Kabupaten Nabire hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini kemudian menurun secara bertahap menjadi 23,35 persen pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan sebesar lebih dari 10 persen selama 14 tahun, atau turun -0,79 persen per tahun, namun angka kemiskinan yang masih di atas 23 persen menunjukkan bahwa masih lebih dari satu dari lima penduduk Kabupaten Nabire belum dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak. Penurunan kemiskinan yang terjadi relatif lambat jika dibandingkan dengan peningkatan PDRB yang cukup pesat, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Jika ketiga perkembangan variabel ini dianalisis secara bersama, terlihat adanya hubungan yang saling terkait namun tidak sepenuhnya searah. Peningkatan PDRB yang pesat seharusnya diikuti oleh penurunan kemiskinan yang lebih tajam, tetapi fakta menunjukkan bahwa meskipun PDRB naik hampir dua kali lipat, kemiskinan hanya turun sekitar 10 poin persentase. Di sisi lain, peningkatan IPM yang terjadi secara perlahan mungkin menjadi salah satu faktor penyebab lambatnya penurunan kemiskinan. Hal ini karena IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta dari pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang memadai cenderung tidak akan mampu menekan kemiskinan secara efektif.

Fenomena ini menjadi dasar penting untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai sejauh mana pengaruh PDRB terhadap IPM, serta bagaimana peran IPM dalam memediasi hubungan antara PDRB dan kemiskinan. Apakah peningkatan PDRB benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan IPM? Dan apakah peningkatan IPM kemudian berdampak pada penurunan kemiskinan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab melalui analisis regresi dan analisis jalur yang disajikan pada tabel-tabel berikutnya, dimulai dari Tabel 1 yang menguji pengaruh PDRB terhadap IPM.

**2. Analisis Jalur**

Tabel 1 berikut ini menyajikan hasil analisis regresi mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel independen terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen di Kabupaten Nabire selama periode 2010 hingga 2023.

**Tabel 1. Model Jalur I : PDRB → IPM**

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t-stat	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	58.4692	0.6838		85.5064	0.0000
PDRB	1.389	0.1058	0.9669	13.1289	0.0000
R-squared = 0.935 ; F-stat = 172.37 (p-value = 0.000)					
Dependent variable : IPM					

Sumber : data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, persamaan regresi yang terbentuk adalah  $IPM = 58,4692 + 1,389 \times PDRB$ . Koefisien konstanta sebesar 58,4692 menunjukkan bahwa jika nilai PDRB adalah nol, maka IPM diperkirakan berada pada angka 58,4692. Sementara itu, koefisien regresi PDRB sebesar 1,389 bersifat positif, yang berarti bahwa setiap peningkatan PDRB sebesar satu triliun rupiah akan diikuti oleh peningkatan IPM sebesar 1,389 poin. Arah hubungan yang positif ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan PDRB berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Nabire.

Dari segi kekuatan hubungan, nilai standarized coefficients Beta sebesar 0,9669 menunjukkan bahwa pengaruh PDRB terhadap IPM sangat kuat, hampir mendekati 1. Hal ini berarti bahwa sekitar 96,69 persen variasi dalam IPM dapat dijelaskan oleh variasi dalam PDRB, sementara sisanya

dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai R-squared sebesar 0,935 atau 93,5 persen semakin mengonfirmasi bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik, di mana PDRB mampu menjelaskan sebagian besar perubahan yang terjadi pada IPM selama periode pengamatan.

Signifikansi pengaruh PDRB terhadap IPM dapat dilihat dari nilai t-statistik sebesar 13,1289 dan p-value sebesar 0,0000. Karena nilai p-value jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (atau 5 persen), maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh PDRB terhadap IPM adalah signifikan secara statistik. Dengan kata lain, hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara PDRB dan IPM dapat ditolak. Selain itu, nilai F-statistik sebesar 172,37 dengan p-value 0,000 juga menegaskan bahwa model regresi secara keseluruhan layak dan signifikan.

Secara substantif, temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nabire yang diukur melalui peningkatan PDRB ternyata berdampak positif dan signifikan terhadap perbaikan kualitas pembangunan manusia. Hal ini berarti bahwa ketika perekonomian daerah tumbuh, pemerintah maupun masyarakat memiliki lebih banyak sumber daya untuk dialokasikan pada sektor-sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, serta peningkatan standar hidup layak.

**Tabel 2. Model Jalur II : PDRB → Kemiskinan**

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t-stat	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	40.707	2.570		15.842	0.000
PDRB	-2.250	0.398	-0.853	-5.658	0.000
R-squared = 0.727 ; F-stat = 32.01 (p-value = 0.000)					
Dependent variable : Miskin					

Sumber : data diolah (2024)

Tabel 2 di atas menyajikan hasil analisis regresi mengenai pengaruh langsung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Nabire selama periode 2010 hingga 2023. Berdasarkan tabel tersebut, persamaan regresi yang terbentuk adalah  $Miskin = 40,707 - 2,250 \times PDRB$ . Koefisien konstanta sebesar 40,707 menunjukkan bahwa jika nilai PDRB adalah nol, maka tingkat kemiskinan diperkirakan mencapai 40,707 persen. Sementara itu, koefisien regresi PDRB sebesar -2,250 bersifat negatif, yang berarti bahwa setiap peningkatan PDRB sebesar satu triliun rupiah akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan sebesar 2,250 poin persentase. Arah hubungan yang negatif ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi secara langsung berkontribusi terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nabire.

Dari segi kekuatan hubungan, nilai standardized coefficients Beta sebesar -0,853 menunjukkan bahwa pengaruh PDRB terhadap kemiskinan tergolong sangat kuat dan bersifat negatif, dengan nilai absolut 0,853 yang berarti sekitar 85,3 persen variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi dalam PDRB. Nilai R-squared sebesar 0,727 atau 72,7 persen menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki kemampuan prediksi yang baik, di mana PDRB mampu menjelaskan hampir tiga perempat dari perubahan yang terjadi pada tingkat kemiskinan selama periode pengamatan 2010 hingga 2023. Sisa sebesar 27,3 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model seperti kebijakan pemerintah, distribusi pendapatan, dan akses terhadap layanan sosial.

Signifikansi pengaruh PDRB terhadap kemiskinan dapat dilihat dari nilai t-statistik sebesar -5,658 dan p-value sebesar 0,000. Karena nilai p-value jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh PDRB terhadap kemiskinan adalah signifikan secara statistik. Nilai F-statistik sebesar 32,01 dengan p-value 0,000 juga menegaskan bahwa model regresi secara keseluruhan layak dan signifikan. Secara substantif, temuan ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDRB secara langsung mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Nabire, sehingga kebijakan pro-pertumbuhan ekonomi tetap relevan dan penting untuk terus dijalankan, meskipun pemerintah daerah juga perlu memperhatikan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi kemiskinan.

Analisis regresi berikutnya yang dilakukan adalah pada jalur ketiga, yaitu pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan, dengan hasilnya sebagai berikut.

**Tabel 3. Model Jalur III : IPM → Kemiskinan**

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t-stat	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	123.193	22.2196		5.5444	0.0001
IPM	-1.438	0.3302	-0.7826	-4.3547	0.0009
R-squared = 0.612 ; F-stat = 18.96 (p-value = 0.001)					
Dependent variable : Miskin					

Sumber : data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 3 di atas, persamaan regresi untuk jalur ketiga ini yang terbentuk adalah  $Miskin = 123,193 - 1,438 \times IPM$ . Koefisien konstanta sebesar 123,193 menunjukkan bahwa tanpa adanya pembangunan manusia yang baik, kemiskinan akan berada pada tingkat yang ekstrem. Sementara itu, koefisien regresi IPM sebesar -1,438 bersifat negatif, yang berarti bahwa setiap peningkatan IPM sebesar satu poin akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,438 poin persentase. Arah hubungan yang negatif ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak), maka semakin rendah tingkat kemiskinan di Kabupaten Nabire.

Dari segi kekuatan hubungan, nilai *standardized coefficients* Beta sebesar -0,783 menunjukkan bahwa pengaruh IPM terhadap kemiskinan tergolong kuat dan bersifat negatif, dengan nilai absolut 0,783 yang berarti sekitar 78,3 persen variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi dalam IPM. Nilai *R-squared* sebesar 0,612 atau 61,2 persen menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki kemampuan prediksi yang cukup baik, di mana lebih dari separuh variabilitas dalam tingkat kemiskinan mampu dijelaskan oleh variabel IPM. Sisa sebesar 38,8 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model seperti kebijakan pemerintah, stabilitas ekonomi, atau faktor eksternal lainnya.

Signifikansi pengaruh IPM terhadap kemiskinan dapat dilihat dari nilai *t*-statistik sebesar -4,355 dan *p*-value sebesar 0,001. Karena nilai *p*-value jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh IPM terhadap kemiskinan adalah signifikan secara statistik. Nilai *F*-statistik sebesar 18,96 dengan *p*-value 0,001 juga menegaskan bahwa model regresi secara keseluruhan layak dan signifikan. Secara substantif, temuan ini membuktikan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui IPM secara langsung mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Nabire. Hal ini menegaskan bahwa investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan standar hidup layak merupakan strategi yang tepat dan efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan, sekaligus melengkapi hasil analisis sebelumnya bahwa IPM layak untuk diuji lebih lanjut perannya sebagai variabel *intervening*.

Sebelum dilakukan analisis jalur secara lebih mendalam, penting untuk terlebih dahulu menguji apakah variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) benar-benar berperan sebagai variabel mediasi (*intervening*) yang signifikan dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Nabire. Uji yang digunakan untuk keperluan ini adalah Uji Sobel (Sobel Test). Uji Sobel digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi. Dengan kata lain, uji ini menjawab pertanyaan apakah IPM secara statistik layak dianggap sebagai perantara yang memperkuat atau menjelaskan hubungan antara PDRB dan kemiskinan.

**Tabel 4. Hasil Uji Sobel**

	Masukan:	Statistik uji:	Kesalahan Standar:	nilai p :
A	1.389	Uji Sobel: -4.13345771	0.48322304	0.00003573
B	-1.438	Tes Aroian: -4.12269764	0.48448423	0.00003745
s <sub>a</sub>	0.1058	Tes Goodman: -4.14430248	0.48195855	0.00003408
s <sub>b</sub>	0.3302	Reset all	Menghitung	

Sumber : Calculation for the Sobel test : An interactive calculation tool for mediation tests (2024)

Tabel 4 di atas menyajikan hasil perhitungan Uji Sobel berdasarkan data yang telah diolah. Perhitungan ini menggunakan koefisien jalur dari hasil analisis regresi sebelumnya, yaitu koefisien pengaruh PDRB terhadap IPM (jalur a) sebesar 1,389 dengan standar error 0,1058, serta koefisien pengaruh IPM terhadap kemiskinan (jalur b) sebesar -1,438 dengan standar error 0,3302. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa statistik uji Sobel (Sobel test statistic) bernilai -4,133 dengan p-value sebesar 0,000. Nilai p-value yang jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (atau 5 persen) mengindikasikan bahwa pengaruh tidak langsung PDRB terhadap kemiskinan melalui IPM adalah signifikan secara statistik.

Secara lebih rinci, nilai absolut statistik uji Sobel sebesar 4,133 juga jauh melampaui nilai kritis Z pada taraf signifikansi 5 persen yaitu 1,96. Dengan demikian, hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh mediasi (tidak ada pengaruh tidak langsung) dapat ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa IPM berperan sebagai variabel mediasi diterima. Temuan ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa IPM merupakan variabel intervening yang signifikan dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Nabire. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpengaruh langsung terhadap penurunan kemiskinan, tetapi juga berpengaruh tidak langsung melalui peningkatan kualitas pembangunan manusia terlebih dahulu.

Secara substantif, hasil Uji Sobel ini memiliki makna penting dalam konteks kebijakan pembangunan di Kabupaten Nabire. Pertama, temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia akan kurang efektif dalam menurunkan kemiskinan. Dengan kata lain, PDRB yang meningkat harus diimbangi dengan perbaikan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta standar hidup layak agar dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan lebih optimal. Kedua, uji Sobel yang signifikan ini juga membenarkan bahwa model analisis jalur yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepat dan layak, di mana IPM berfungsi sebagai mekanisme transmisi yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah ke depan sebaiknya tidak hanya berfokus pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga secara simultan memperkuat investasi pada sektor-sektor pembangunan manusia agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin.

Setelah diketahui bahwa IPM secara signifikan berperan sebagai variabel mediasi berdasarkan Uji Sobel pada Tabel 4, langkah selanjutnya adalah memahami ringkasan seluruh koefisien jalur yang telah diuji sebelumnya melalui Tabel 5 berikut ini.

**Tabel 5. Hasil Uji Statistik Model Analisis Jalur**

Jalur	Koefisien Jalur	t-stat	Sig.
PDRB → IPM	0.967	13.129	0.000
PDRB → Miskin	-0.853	-5.658	0.000
IPM → Miskin	-0.783	-4.355	0.001

Sumber : data diolah (2024)

Tabel 5 menyajikan hasil uji statistik lengkap dari model analisis jalur yang mencakup tiga hubungan utama, yaitu pengaruh PDRB terhadap IPM, pengaruh langsung PDRB terhadap kemiskinan,

serta pengaruh IPM terhadap kemiskinan. Hasil ini merangkum koefisien jalur (standardized coefficients Beta), nilai t-statistik, serta tingkat signifikansi dari masing-masing hubungan. Berdasarkan tabel ini, jalur pertama yaitu PDRB terhadap IPM memiliki koefisien jalur sebesar 0,967 dengan t-statistik 13,129 dan signifikansi 0,000. Nilai koefisien yang positif dan sangat mendekati 1 ini menunjukkan bahwa pengaruh PDRB terhadap IPM sangat kuat dan searah. Semakin tinggi PDRB, semakin tinggi pula IPM di Kabupaten Nabire. Jalur kedua yaitu PDRB terhadap kemiskinan secara langsung memiliki koefisien jalur sebesar -0,853 dengan t-statistik -5,658 dan signifikansi 0,000. Tanda negatif pada koefisien ini mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB akan menurunkan tingkat kemiskinan secara langsung. Jalur ketiga yaitu IPM terhadap kemiskinan memiliki koefisien jalur sebesar -0,783 dengan t-statistik -4,355 dan signifikansi 0,001. Sama seperti jalur kedua, koefisien negatif ini berarti bahwa peningkatan IPM akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Seluruh jalur memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, sehingga ketiganya dinyatakan signifikan secara statistik.

Dari Tabel 5 di atas, dapat dihitung besarnya pengaruh langsung, tidak langsung dan total dari variabel PDRB dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Nabire sebagai berikut.

**Tabel 6. Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total Dari PDRB dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Variabel	Pengaruh Langsung (ke Miskin)	Pengaruh Tidak Langsung (via IPM)	Total Pengaruh
PDRB	-0,853	$0,967 \times (-0,783) = -0,757$	$(-0,853) + (-0,757) = -1,610$
IPM	-0,783	-	-0,783

Sumber : data diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan beberapa hal, yaitu : *Pertama*, pengaruh langsung PDRB terhadap kemiskinan sebesar -0,853 berarti bahwa setiap peningkatan satu standar deviasi pada PDRB akan menurunkan tingkat kemiskinan secara langsung sebesar 0,853 standar deviasi. *Kedua*, pengaruh tidak langsung PDRB terhadap kemiskinan melalui IPM sebesar -0,757 berarti bahwa selain berpengaruh langsung, PDRB juga berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan secara tidak langsung melalui peningkatan IPM terlebih dahulu, dengan besar kontribusi 0,757 standar deviasi. *Ketiga*, total pengaruh PDRB terhadap kemiskinan adalah sebesar -1,610, yang merupakan penjumlahan dari pengaruh langsung dan tidak langsung. Angka total ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, setiap peningkatan PDRB akan menurunkan kemiskinan sebesar 1,610 standar deviasi. *Keempat*, pengaruh langsung IPM terhadap kemiskinan sebesar -0,783 berarti bahwa setiap peningkatan satu standar deviasi pada IPM akan menurunkan tingkat kemiskinan secara langsung sebesar 0,783 standar deviasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa total pengaruh PDRB terhadap kemiskinan (-1,610) lebih besar dibandingkan pengaruh langsungnya saja (-0,853), yang membuktikan bahwa IPM berperan penting sebagai variabel mediasi yang memperkuat dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Nabire.

### 3. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, pembahasan ini akan menginterpretasikan temuan-temuan utama secara komprehensif, mulai dari gambaran umum perkembangan variabel, hasil analisis jalur, uji Sobel, hingga perhitungan pengaruh langsung, tidak langsung, dan total pengaruh. Pembahasan ini juga akan mengaitkan temuan empiris dengan teori yang relevan serta membandingkannya dengan berbagai studi empiris terkini dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang dinamika hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas pembangunan manusia, dan kemiskinan di Kabupaten Nabire.

Dari hasil analisis jalur yang dilakukan, pertama-tama ditemukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan koefisien jalur sebesar 0,967. Temuan ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi Solow (1956) yang menyatakan bahwa peningkatan output ekonomi akan menyediakan lebih banyak sumber daya bagi pemerintah dan masyarakat untuk berinvestasi pada

sektor-sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Ketika perekonomian tumbuh, pendapatan asli daerah meningkat, sehingga alokasi anggaran untuk pembangunan manusia, seperti pembangunan sekolah, pelatihan guru, peningkatan fasilitas kesehatan, serta program perlindungan sosial, dapat diperbesar. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Arrizal (2022) di Kalimantan Tengah yang menemukan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan serta IPM memiliki pengaruh paling besar dalam menurunkan kemiskinan. Selain itu, penelitian Angelia dkk. (2025) di Sumatera Utara juga menegaskan bahwa PDRB merupakan faktor paling dominan dalam menurunkan kemiskinan, meskipun dalam penelitian tersebut IPM tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nabire terbukti menjadi fondasi penting bagi perbaikan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana juga ditemukan oleh Amar & Arkum (2024) di Kabupaten Bangka bahwa PDRB dan IPM bersama-sama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Selanjutnya, ketika melihat pengaruh langsung PDRB terhadap kemiskinan, hasil analisis menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh langsung, negatif, dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien jalur sebesar  $-0,853$ . Temuan ini mengonfirmasi teori kemiskinan Lewis (1954) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga secara langsung mampu mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Berdasarkan perhitungan dalam bentuk *unstandardized coefficients*, setiap peningkatan PDRB sebesar satu triliun rupiah diperkirakan menurunkan kemiskinan sebesar 2,250 poin persentase. Temuan ini sejalan dengan penelitian Roseline (2023) di Provinsi Lampung yang menemukan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, serta penelitian Purnama dkk. (2025) di Lampung yang juga menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua studi sepakat dengan temuan ini. Beberapa penelitian justru menemukan arah hubungan yang berlawanan. Misalnya, Susanti (2013) di Jawa Barat menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti peningkatan PDRB justru meningkatkan kemiskinan. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Andykha dkk. (2018) di Jawa Tengah bahwa laju pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, serta Hidayat dkk. (2024) di Lampung yang juga menemukan pengaruh positif PDRB terhadap kemiskinan. Bahkan Sari (2024) di Jawa Timur dalam perspektif ekonomi Islam juga menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang tidak sejalan dengan teori *trickle down effect*. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan sangat bergantung pada bagaimana hasil pertumbuhan tersebut didistribusikan. Di Kabupaten Nabire, temuan positif ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi telah cukup inklusif dan mampu menekan kemiskinan secara langsung, berbeda dengan daerah-daerah di mana pertumbuhan ekonomi justru memperlebar ketimpangan.

Selanjutnya, terkait pengaruh IPM terhadap kemiskinan, hasil analisis menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien jalur sebesar  $-0,783$ . Temuan ini sangat sejalan dengan teori pembangunan manusia Amartya Sen (1999) yang menekankan bahwa kesejahteraan sejati tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi dari kapabilitas individu yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang baik cenderung lebih mudah mengakses peluang kerja yang lebih baik. Masyarakat yang sehat lebih produktif dan memiliki beban pengeluaran kesehatan yang lebih ringan. Masyarakat yang memiliki standar hidup layak memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap guncangan ekonomi. Ketiga dimensi ini bekerja secara sinergis untuk memutus mata rantai kemiskinan. Temuan ini konsisten dengan hampir seluruh studi empiris yang dikaji. Sayifullah & Gandasari (2016) di Provinsi Banten menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Nasrulloh (2025) di Kabupaten Sampang juga melaporkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan, bahkan menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan PDRB dalam menurunkan kemiskinan. Widyantoro & Agustini (2025) di 34 provinsi di Indonesia menemukan bahwa hanya IPM yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara PDRB tidak signifikan. Raharjo (2024) di DIY, Arrizal (2022) di Kalimantan Tengah, Ilmi (2021) di lima provinsi dengan kemiskinan tertinggi, serta Sari (2024) di Jawa Timur semuanya sepakat bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Konsistensi temuan ini di berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda memperkuat keyakinan bahwa investasi pada pembangunan manusia merupakan strategi yang sangat efektif dalam pengentasan kemiskinan, terlepas dari apakah pertumbuhan ekonomi suatu daerah tinggi atau rendah.

Lebih lanjut, terkait peran IPM sebagai variabel mediasi, hasil uji Sobel membuktikan bahwa IPM berperan sebagai variabel intervening yang signifikan dengan nilai statistik uji Sobel sebesar -4,133 dan p-value 0,000. Temuan ini memiliki implikasi teoretis dan praktis yang mendalam. Secara teoretis, hasil ini mengonfirmasi bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak bersifat linier sederhana, melainkan melalui mekanisme transmisi berupa peningkatan kualitas pembangunan manusia. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang ingin berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan harus terlebih dahulu mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih prima, dan standar hidup yang lebih layak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amar & Arkum (2024) di Kabupaten Bangka yang secara implisit menunjukkan bahwa PDRB dan IPM bekerja bersama-sama dalam menurunkan kemiskinan, serta penelitian Arrizal (2022) yang menemukan bahwa IPM merupakan variabel dengan pengaruh paling besar terhadap penurunan kemiskinan. Penelitian Widyantoro & Agustin (2025) juga memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa IPM lebih vital perannya dibandingkan PDRB dalam pengentasan kemiskinan di tingkat nasional. Bahkan di daerah dengan kemiskinan tertinggi seperti Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Gorontalo, Ilmi (2021) menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan sementara PDRB tidak signifikan, yang menegaskan bahwa pembangunan manusia menjadi faktor kunci terutama di daerah-daerah tertinggal.

Terkait perbandingan pengaruh langsung dan tidak langsung, berdasarkan perhitungan yang telah disajikan, pengaruh langsung PDRB terhadap kemiskinan adalah -0,853, sementara pengaruh tidak langsung melalui IPM adalah -0,757, sehingga total pengaruh PDRB terhadap kemiskinan mencapai -1,610. Angka ini menunjukkan bahwa hampir separuh, yaitu sekitar 47 persen, dari total pengaruh PDRB terhadap kemiskinan disalurkan melalui peningkatan IPM terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa IPM memiliki peran yang hampir seimbang dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri dalam upaya menurunkan kemiskinan. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kualitas pembangunan manusia akan kehilangan hampir setengah dari potensi dampaknya. Sebaliknya, strategi yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut akan jauh lebih efektif. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari berbagai studi empiris. Angelia dkk. (2025) menyarankan kebijakan terintegrasi yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan pengurangan pengangguran. Andykha dkk. (2018) merekomendasikan peningkatan koordinasi antar dinas dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan dan optimalisasi pelayanan kesehatan. Raharjo (2024) menekankan bahwa belanja pemerintah yang tepat sasaran juga berperan penting dalam mendukung penurunan kemiskinan melalui peningkatan IPM. Dengan demikian, kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut inklusif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak semua studi menemukan hasil yang identik. Beberapa penelitian justru menemukan bahwa IPM tidak selalu signifikan dalam setiap konteks. Misalnya, Angelia dkk. (2025) di Sumatera Utara menemukan bahwa secara parsial IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, meskipun secara simultan ketiga variabel bersama-sama signifikan. Ngaisah (2023) di Kabupaten Wonosobo bahkan menemukan bahwa IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa meskipun kualitas sumber daya manusia terus meningkat, pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan belum optimal karena masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan pemerataan akses pendidikan serta kesehatan. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas IPM dalam menurunkan kemiskinan sangat bergantung pada kualitas implementasi kebijakan pendidikan dan kesehatan di masing-masing daerah. Di Kabupaten Nabire, temuan yang menunjukkan IPM berperan signifikan sebagai variabel mediasi mengindikasikan bahwa peningkatan IPM yang terjadi selama periode 2010 hingga 2023 telah cukup berkualitas dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, berbeda dengan daerah-daerah di mana peningkatan IPM belum diikuti oleh pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan.

Implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan dari temuan ini sangat relevan dengan rekomendasi dari berbagai studi empiris yang telah dikaji. Pemerintah Kabupaten Nabire perlu terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor unggulan, investasi infrastruktur, serta kemudahan berusaha, sebagaimana disarankan oleh Angelia dkk. (2025) bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan perlu difokuskan pada peningkatan PDRB melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif,

perluasan kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan investasi. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut harus diarahkan agar berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan porsi anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan, misalnya melalui pembangunan sekolah di daerah terpencil, peningkatan kualitas guru, serta program beasiswa bagi siswa miskin, sebagaimana direkomendasikan oleh Amar & Arkum (2024) untuk memberdayakan masyarakat tidak mampu dengan membangun budaya kemandirian dan mendukung usaha mikro. Di sektor kesehatan, pemerintah perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas, misalnya dengan membangun puskesmas di setiap distrik, menyediakan tenaga medis yang memadai, serta memperluas cakupan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, sesuai dengan temuan Raharjo (2024) bahwa belanja pemerintah yang tepat sasaran mampu mengurangi beban masyarakat miskin. Selain itu, program-program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha bagi UMKM, serta pengembangan sektor pertanian dan agribisnis berbasis komunitas perlu terus diperluas. Dengan strategi yang terintegrasi ini, pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin inklusif dan berperan signifikan dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan, sejalan dengan kesimpulan Arrizal (2022) bahwa investasi dalam pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan perluasan lapangan kerja, merupakan kunci utama dalam mengentaskan kemiskinan.

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nabire berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peningkatan IPM sebagai variabel mediasi. Temuan ini konsisten dengan sebagian besar studi empiris yang menunjukkan peran vital IPM dalam pengentasan kemiskinan, serta memberikan panduan praktis yang konkret bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nabire..

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Nabire, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel intervening. Secara langsung, PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien jalur sebesar  $-0,853$ , yang berarti setiap peningkatan PDRB akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup optimal karena masih terdapat kesenjangan antara laju pertumbuhan ekonomi dan laju penurunan kemiskinan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa IPM berperan sebagai variabel intervening yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh uji Sobel dengan nilai statistik  $-4,133$  dan  $p$ -value  $0,000$ , yang berarti pengaruh tidak langsung PDRB terhadap kemiskinan melalui IPM adalah signifikan secara statistik.

Secara kuantitatif, pengaruh tidak langsung PDRB terhadap kemiskinan melalui IPM mencapai  $-0,757$ , sehingga total pengaruh PDRB terhadap kemiskinan menjadi  $-1,610$ . Angka ini mengindikasikan bahwa hampir separuh, yaitu sekitar 47 persen, dari total pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan disalurkan melalui peningkatan kualitas pembangunan manusia terlebih dahulu. Dengan demikian, untuk mencapai penurunan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Nabire, pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Kebijakan yang hanya berfokus pada pencapaian target pertumbuhan PDRB tanpa memperhatikan investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan standar hidup layak akan kehilangan hampir setengah dari potensi dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nabire dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

## 2. Saran-Saran

Secara teoritis, penelitian ini telah berhasil membuktikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan sebagai variabel intervening yang signifikan dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Nabire. Namun, untuk mengembangkan kerangka teori yang lebih komprehensif, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin memediasi atau memoderasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, seperti ketimpangan pendapatan, pengangguran, belanja modal pemerintah, atau desentralisasi fiskal. Selain itu, penting bagi peneliti mendatang untuk menerapkan pendekatan analisis yang lebih beragam, termasuk metode kualitatif seperti wawancara mendalam dan studi kasus, agar dapat menggali perspektif masyarakat secara langsung dan memahami konteks sosial budaya lokal yang mungkin mempengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan.

Adapun secara praktis, disarankan untuk pemerintah kabupaten menerapkan kebijakan yang secara simultan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Di sektor pendidikan, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan sekolah di daerah terpencil, peningkatan kualitas guru, serta penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin. Di sektor kesehatan, pemerintah harus meningkatkan akses layanan kesehatan dengan membangun puskesmas di setiap distrik, menyediakan tenaga medis yang memadai, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal bagi UMKM, dan pendampingan petani serta nelayan lokal. Pemerintah juga disarankan membangun kerjasama dengan lembaga swasta, organisasi non-pemerintah, dan perguruan tinggi agar program-program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amar, H., & Arkum, D. (2024). Pengaruh produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka. *Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, 10(1), 93–111.
- Andykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis pengaruh PDRB, tingkat pengangguran, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 33(2), 113–123.
- Angelia, T., Hasugian, F. M. S., & Suharianto, J. (2025). Analisis pengaruh pengangguran, IPM dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi*, 3(2), 42–62.
- Arofah, F. M. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Variabel Intervening Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Jember (Doctoral Dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).
- Arrizal, L. D. (2022). Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), produk domestik regional bruto (PDRB) dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014-2021. [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Hidayat, T., Anisanur, T., Mahendra, R. L., & Kurniawan, M. (2024). Analisis pengaruh PDRB, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2012-2021. *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(3), 212–228.
- Ilmi, M. B. (2021). Pengaruh PDRB, IPM dan TPT terhadap kemiskinan di lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia periode 2010-2019. [Skripsi, IAIN Ponorogo].
- Lewis, W. Arthur. (1954). *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*. Manchester School of Economic and Social Studies, Vol. 22, No. 2, hal. 139–191.
- Nasrulloh, R. I. (2025). Pengaruh pertumbuhan PDRB dan IPM terhadap kemiskinan Kabupaten Sampang Jawa Timur. *Independent : Journal of Economics*, 5(1), 136–146.

- Ngaisah, H. (2023). Analisis pengaruh PDRB, IPM, upah minimum, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Wonosobo tahun 2010-2022. [Skripsi, Universitas Tidar].
- Purnama, D. A., Farhandhanu, F. M., Syafitri, N. E. S., Ramadanti, S., & Sabila, R. (2025). Analisis pengaruh pendidikan, pengangguran, dan PDRB per kapita terhadap pengentasan kemiskinan Provinsi Lampung 2020-2024. *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan (JSEP)*, 3(3), 687–693.
- Raharjo, A. M. R. (2024). Analisis pengaruh PDRB, IPM, tingkat pengangguran dan belanja pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2023. [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Roseline, F. C. (2023). Analisis pengaruh PDRB perkapita, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung [Skripsi, Universitas Lampung].
- Sari, I. R. (2024). Pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dalam perspektif ekonomi Islam [Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember].
- Sayifullah, & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2), 236–255.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
- Susanti, S. (2013). Pengaruh produk domestik regional bruto, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan analisis data panel. *Jurnal Manajemen Indonesia (JMI)*, 9(1), 1–18.
- Widyantoro, A. A., & Agustin, E. S. A. S. (2025). Pengaruh PDRB provinsi, indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum provinsi (UMP), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap persentase penduduk miskin tingkat provinsi di Indonesia tahun 2019-2023. *Tirtayasa Ekonomika*, 20(1), 113–124.